

KONSEP NEGARA MENURUT AL-FARABI DAN KHOMEINI (PERBEDAAN DAN PERSAMAAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu:
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2005	No. REG : K/U/2005/AF/01
Oleh : OI AF	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

ABDUL HARIS
NIM : EO.13.00.131

al-Farabi - biografi
Khomeini - biografi
Dr. H. M. Ghani

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FLSAFAT
2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Abdul Haris ini telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 25 - 01 - 2015
Pembimbing,



Drs. H. Muslih Fuadie, M.Ag.
NIP. 150/203 828

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Abdul Haris ini telah
Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 01 Pebruari 2005



Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

DR. H. ABDULLAH KHOZIN AFANDI, M.A.

NIP. 150 190 692

Tim Penguji :
Ketua,

Drs. H. MUSLIH FUADIE, M.Ag.

NIP. 150 203 828

Sekretaris,

H. HAMMIS SYAFAO, M.Fil.I

NIP. 150 321 631

Penguji I,

Drs. H. KASNO, M.Ag.

NIP. 150 224 884

Penguji II,

Drs. LOEKISNO C.W., M.Ag

NIP. 150 259 374

ABSTRAKSI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam percaturan politik, pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, pelaksanaan Syura yang pertama di lakukan oleh umat Islam sejak wafatnya Nabi untuk memilih khalifah beliau dan peristiwa Tahkim antara Ali dengan Mu'awiyah menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam. Sebab secara aspiratif, umat Islam dalam dua peristiwa itu mulai berpolarisasi untuk mengorbitkan siapa yang berhak menjadi khalifah. Akibatnya umat Islam terkotak-kotak ke dalam aliran-aliran, yaitu : Khawarij, Syi'ah, dan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (Sunni).

Demikian juga dengan kedua tokoh (al-Farabi dan Khomeini), mereka berdua terpengaruh oleh salah satu aliran tersebut di atas yaitu Syi'ah. di dalam konsep kenegaraan yaitu proses pemilihan pemimpin utama (al-Farabi) atau imam (Khomeini).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terjadinya persamaan dalam konsep Negara al-Farabi dan Khomeini

disebabkan karena keduanya sama-sama lahir dan tumbuh dewasa dalam keadaan pemerintahan yang kacau. Maka berangkat dari sinilah keduanya mempunyai pemikiran politik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu Negara yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat serta dapat menjamin keamanan hidup rakyatnya.

Perbedaan konsep Negara al-Farabi dengan Khomeini terletak pada bentuk pemerintahan dan bentuk Negara. Bentuk Negara al-Farabi di lihat dalam karyanya

Ara Ahl Madinah al-Fadhilah yaitu tentang Negara utama merujuk ke bentuk kerajaan yang mana seorang pemimpin yang utama adalah tidak ada pemimpin lagi setelah dia dan tidak ada yang memerintah kepadanya. Selain itu konsep bentuk Negara kerajaan dilatar belakangi oleh semasa hidupnya pada masa kekuasaan bani Abbasiyah, dan menjadikannya muncul pemikiran politiknya. Sedangkan bentuk Negara Khomeini adalah berbentuk Republik.

Menurut al-Farabi Masyarakat Kota, dengan seorang kepala negara atau pimpinan yang berwenang, itulah yang disebut negara.

Menurut Khomeini negara yang dipimpin oleh seorang faqih dimana ia disamping menjalankan hukum (syari'ah) juga sebagai kepala pemerintahan. Dan menerapkan hukum-hukum Tuhan yang didasarkan pada kesamaan dan keadilan, itulah yang disebut negara.

Bentuk pemerintahan di dalam konsep al-Farabi adalah berasal dari rakyat yaitu sebuah pemerintahan demokrasi. Sedangkan bentuk pemerintahan Khomeini adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum (syari'ah) Tuhan atau teokrasi dan juga pemerintahan berasal dari rakyat atau demokrasi, yang oleh Khomeini diterapkan secara bersamaan yang melahirkan bentuk pemerintahan baru yang disebut teodemokrasi.

Dengan demikian skripsi dengan judul Konsep Negara menurut Al-Farabi dan Khomeini adalah bertujuan untuk melacak kemungkinan adanya akar-akar konsep Khomeini pada masa lampau, atau justru mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya.



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMIL SURABAYA	
No. KLAS	No. LUG
K	
U-2005	NOAL BUKU :
001	
AF	

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Hal
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Abstraksi	iv
Motto dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Pedoman Transliterasi	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Data yang akan dihimpun.....	12

	3. Sumber data.....	12
	4. Analisa data.....	13
	I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB I	: AL-FARABI DAN KHOMEINI	
	A. AL-FARABI.....	15
	1. Biografi.....	15
	2. Pendidikan.....	18
	3. Karyanya.....	19
	4. Latar Belakang dan Karier Politik	21
	B. KHOMEINI.....	24
	1. Biografi.....	24
	2. Pendidikannya.....	25
	3. Karyanya	32
	4. Latar Belakang dan Karier Politik	32
BAB III	: KONSEP NEGARA AL-FARABI DAN KHOMEINI	
	A. PENGERTIAN UMUM NEGARA.....	37
	B. KONSEP NEGARA AL-FARABI.....	40
	a. Negara dalam Sejarah Politik.....	40
	b. Definisi Negara Al-Farabi.....	42
	c. Tujuan Negara Al-Farabi.....	46
	d. Pengaruh Madzhab Syi'ah Ismailiyah	49
	e. Masyarakat dan Kepala Negara	54

f. Hubungan Negara dan Pemerintahan	58
g. Bentuk Negara dan Pemerintahan	62
C. KONSEP NEGARA KHOMEINI	64
a. Definisi Negara Khomeini	64
b. Tujuan Negara Khomeini.....	65
c. Hubungan Negara dan Pemerintahan.....	69
d. Kepala Negara	72
e. Pengaruh Madzhab Syi'ah Istna Asyariyah	74
f. Bentuk Negara dan Pemerintahan	75

BAB IV : ANALISA

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Negara

Al-Farabi dengan Khomeini.....	79
--------------------------------	----

B. Analisa.....	82
-----------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
--------------------	----

B. Saran-Saran.....	88
---------------------	----

C. Penutup.....	89
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ilmu politik terdapat beberapa konsep. Di antara konsep-konsep itu, konsep kekuasaan dan konsep negara merupakan dua buah konsep yang penting. Membicarakan kedua konsep itu sesungguhnya adalah membicarakan hakikat, wujud dan ruang lingkup ilmu politik, dan yang kita kaji di sini adalah konsep negara menurut al-Farabi dan Khomeini.¹

Konsep negara adalah yang membicarakan masalah-masalah negara dan pemerintahan, serta organisasi atau kelompok lain yang berhubungan rapat dengan Negara.

Di samping itu, Negara adalah satu-satunya organisasi unggul (*Par Excellence*) yang pernah diciptakan manusia. Keunggulan negara sebagai sebuah organisasi dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya dari segi keunikan struktur keanggotaannya, ruang ingkupnya, fungsi serta alat-alat yang digunakannya dalam menunaikan tugasnya.

Di pandang dari segi keanggotaannya, negara adalah sebuah organisasi di mana orang tidak dapat keluar atau masuk ke dalamnya demikian saja secara mudah seperti dalam organisasi-organisasi lain, tanpa melalui prosedur yang rumit dan tidak

¹ A.Rahman Zainudcin, *Kekuasaan dan Negara (Pemikiran Politik Ibnu Khaldun)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 1992), 1.

mudah dilakukan. Dari segi ruang lingkupnya, negara mengatur berbagai organisasi, badan dan kelompok lain yang berada di bawahnya, namun ia sendiri tidak diatur oleh badan lain, karena tidak ada badan lain yang lebih tinggi di atasnya. Fungsi negara itu juga dianggap unik, karena ia mengintegrasikan berbagai kelompok yang berada di dalamnya dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terdapat di kalangan mereka. Dan keunikan yang terakhir adalah bahwa negara mempunyai hak untuk memiliki dan menggunakan alat-alat kekerasan, seperti bermacam-macam senjata dan memonopoli pemilikan dan penggunaannya itu.

Sejarah perkembangan ilmu politik memperlihatkan bahwa konsep negara umumnya merupakan konsep yang dominan, sehingga membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.²

Teori politik yang pertama timbul dari perkembangan politik yang terjadi dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan kepala negara. Siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti Nabi dan bagaimana cara pengangkatannya, itulah yang menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam.³

Ungkapan kata "Politik" sukar dirumuskan dalam beberapa kata saja, karena penggunaannya mempunyai arti panjang lebar disamping bermacam kemungkinan pemaknaannya. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, penulis Kamus Umum Bahasa Indonesia, politik dinamakan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau

² Ibid, A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan ...*, 3-5.

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI-Press; 1979), 101.

kenegaraan.⁴ Menurut Wilbur White, penulis *White's Political Dictionary*, ilmu politik adalah mempelajari negara dan pemerintahan. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata "*Polis*" yang berarti "negara kota", dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan kewenangan dan akhirnya kekuasaan.⁵ Dan politik itu berlangsung pada lingkungan yang disebut "sistem politik". Demikian pula, ilmu politik adalah ilmu untuk diterapkan dalam menganalisa interaksi dalam sistem politik.⁶

Maka dalam hal ini perlu dijelaskan dengan adanya sistem politik, yaitu suatu konsepsi antara lain ketentuan tentang apa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara-cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu dipertanggungjawabkan dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut.⁷

Bagi hakim Javid Iqbal,⁸ masalah pokok politik Islam adalah pendirian negara Islam yang berdasarkan konsep *Falah* (kebahagiaan). Dengan tiga ciri pokok

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka; 1978), 763.

⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta; 1997), 19.

⁶ Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaan*, (Bandung: Eresco; 1993), 8-9.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press; 1993), 2-3.

⁸ Javid Iqbal memperoleh gelar doktor dalam filsafat dari Cambridge University. Menulis banyak karya tentang Islam dan Pakistan termasuk *The Ideology of Pakistan*. Sebelum dipromosikan ke Mahkamah Agung Pakistan baru-baru ini, beliau merupakan Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi Punjab. Mumtaz Ahmad (ed.), *State, Politics and Islam (Terjemah Masalah-masalah Teori Politik Islam)*, (Bandung: Mizan, 1996), 11.

negara Islam; keunggulan syari'at; persatuan dan solidaritas umat, dan lembaga yang memerintah masyarakat (khalifah).⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam percaturan politik, pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, pelaksanaan Syura yang pertama di lakukan oleh umat Islam sejak wafatnya Nabi untuk memilih khalifah beliau dan peristiwa Tahkim antara Ali dengan Mu'awiyah menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam. Sebab secara aspiratif, umat Islam dalam dua peristiwa itu mulai berpolarisasi untuk mengorbitkan siapa yang berhak menjadi khalifah. Akibatnya umat Islam terkotak-kotak ke dalam aliran-aliran, yaitu : Khawarij, Syi'ah, dan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (Sunni).¹⁰

Menurut Ali Syari'ati Ummah dan imaman adalah prinsip akidah Islamiyah yang paling penting dan terkenal, khususnya di kalangan mazhab Syi'ah. Ia merupakan kaidah dasar akidah kaum Muslimin umumnya, dan khususnya para penganut Syi'ah, yang paling banyak dibicarakan, baik dulu maupun sekarang.¹¹

Timbulnya pertentangan-pertentangan antara aliran-aliran tersebut, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendorong para juris sunni mengembangkan teori-teori politik mereka tentang khalifah. Dengan ungkapan lain, latar belakang kondisi sosial politik tersebut sangat dominan mempengaruhi para juris sunni untuk mengembangkan teori politik mereka.¹²

⁹ Mumtaz Ahmad (ec.), *State, Politics and Islam (Terjemah Masalah-masalah Teori Politik Islam)*, (Bandung: Mizan, 996), 18.

¹⁰ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 212.

¹¹ Ali Syari'ati, *Ummah Dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 19.

¹² Ibid, Suyuti J. Pulungan , 215-216.

Adanya pengaruh kuat dari alam Yunani terhadap dasar-dasar pemikiran Sunni, indikasi yang paling menonjol dari kecenderungan ini misalnya terlihat dalam idealisme konsep al-Farabi tentang Negara utama (المدينة الفاضلة) banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing memiliki fungsi tertentu.¹³

Menurut Ibrahim Madkour berdasarkan pada konsep Plato, al-Farabi berpendapat bahwa negeri semua bagian dan tanggungannya terkait, seperti tubuh yang jika suatu anggotanya mengaduh maka anggota-anggota yang lain mengaduh merasa panas dan tidak bisa tidur.¹⁴

Diantara para pemikir-pemikir politik juris sunni terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada masa klasik, adalah al-Farabi yang sering digambarkan sebagai pemikir idealis dan disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida falsafah dalam Islam yang sejak itu terus dibangun dengan tekun.¹⁵

Dan juga pada masa al-Farabi, yaitu situasi pada waktu kekuasaan Abbasiyah yang diguncang oleh berbagai gejolak, pertentangan dan pemberontakan dengan berbagai motivasi, antara lain : aliran, kesukuan dan kebendaan. Dan hidup pada

¹³ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Med a Pratama; 1999), 41.

¹⁴ Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam: Metode dan Penerapan, Bagian I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), 88.

¹⁵ Nurchol sh Majid , *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984), 30.

masa pemerintahan Khalifah Mu'tamid dan wafat pada masa pemerintahan Khalifah Muti'¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Farabi ada tiga macam masyarakat yang sempurna : masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang dan masyarakat sempurna kecil. Masyarakat sempurna besar adalah golongan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung, bantu membantu dan kerjasama; masyarakat sempurna sedang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah; sementara masyarakat sempurna kecil terdapat dalam masyarakat yang menghuni dalam satu kota.

Dari tiga macam masyarakat itu, pusat perhatian al-Farabi lebih terfokus pada masyarakat sempurna kecil yang disebut masyarakat kota atau negara kota. Menurutnya, negara kota atau masyarakat kota kesatuan politiknya menempati urutan yang terbaik dari pada negara regional (masyarakat sempurna sedang).¹⁷

Khomeini adalah seseorang yang berhasil meraih kekuasaan di Iran melalui revolusi tahun 1979. Teorinya mengenai pemerintahan¹⁸ oleh faqih atau ulama (valayet-i faqih) adalah inti pemikirannya tentang negara Islam.¹⁹

Dalam karya Khomeini *Kasyf Al-Asrar*, pemerintah baru sah bila menerima aturan Allah artinya adalah menerapkan syari'at. Segenap hukum yang bertentangan dengan syari'at harus digugurkan, karena hanya hukum Allah sajalah yang sah dan

¹⁶ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 1999), 43.

¹⁷ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1997), 77-79.

¹⁸ Bentuk pemerintahan yaitu melukiskan bekerjanya organ tertinggi dalam Negara sejauh mana organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tetap. Lihat *Pengantar Ilmu Politik*, oleh Soelistiyati Ismail Gani, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 129.

¹⁹ Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Dinamika Masa Kini)*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve; 2002), Jilid 6, 63.

tak berubah, meskipun zaman berubah. Orang asing dan peradaban Barat, dalam hal ini, mencuri nalar dan kecerdasan dari kaum Muslim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Katanya, bentuk pemerintahan itu sendiri tak jadi soal, selama hukum Islam diterapkan. Namun jika pemerintahannya berbentuk monarki, maka rajanya harus diangkat oleh mujtahid, yang memilih raja yang adil yang tak melanggar hukum Allah, yang tak menindas, yang tak melanggar hak milik, jiwa dan kehormatan orang.²⁰

B. Rumusan Masalah

Masalah studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep Negara menurut al-Farabi ?
2. Bagaimanakah konsep Negara menurut Khomeini ?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep Negara menurut al-Farabi dengan Khomeini ?

C. Pembatasan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kajian ini membahas dan mengkaji konsep al-Farabi dan Khomeini tentang Negara yaitu bentuk pemerintahan dan bentuk Negara serta perbedaan dan persamaan konsep Negara menurut al-Farabi dengan Khomeini (bentuk pemerintahan dan bentuk Negara), dengan demikian maka kajian ini mengesampingkan konsep al-Farabi dan Khomeini yang berhubungan dengan kebijaksanaan lainnya.

²⁰ Ali Rahmana, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan; 1996), 85.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep Negara menurut al-Farabi.
2. Untuk mengetahui konsep Negara menurut Khomeini.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep Negara menurut al-Farabi dengan Khomeini.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu, dan memperkaya pemikiran Islam terutama terkait dengan pemikiran politik Islam.

2. Secara Praktis

Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya yang mencari informasi seputar wacana politik Islam, sehingga dapat diharapkan pada suatu hari nanti akan ditemukan wacana politik yang komprehensif. Dan dijadikan literatur bagi peneliti yang berikutnya yang meneliti tentang konsep Negara.

F. Definisi Operasional

KONSEP : Pendapat, pangkal pendapat; rancangan: cita-cita yang telah ada dalam pikiran.²¹

NEGARA : Persekutuan bangsa dalam satu daerah tertentu, batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur; daerah dalam satu lingkungan yang teratur.²²

Negara terbentuk berdasarkan adanya : Sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu, pemerintah yang sah yang mengorganisasikannya dan biasanya mempunyai kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar.²³

AL-FARABI : Nama lengkapnya Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalagh, lahir di Wasij distrik Farab (sekarang dikenal dengan kota Atrar), Turkistan pada 257 H (870 M).²⁴

KHOMEINI : Nama lengkapnya Ayatullah Khomeini, lahir di Khomein waktu itu sebuah dusun kecil di Iran Tengah pada 24 Oktober 1902 M. Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid Musawi,

²¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Mode-n*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), 195.

²² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.....*, 267.

²³ Cheppy Harichayono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 39.

²⁴ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 1999), 32.

keturunan Nabi melalui jalur Imam ketujuh Syi'ah, Musa Al-Kazhim.²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulis di sini mengkaji dua buku dan dua skripsi yang menguraikan tentang konsep Negara al-Farabi dan Khomeini.

Buku *Islam dan tata Negara*, yang ditulis oleh H.Munawir Sjadzali, M.A. menguraikan tentang konsep al-Farabi tentang Negara, konsep al-Farabi tersebut, adalah: Asal Mula Tumbuhnya Kota Dan Negara, dalam hal ini al-Farabi sependapat dengan Plato, Aristoteles, dan juga Ibnu Abi Rabi', yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pengaruh Islam atas watak dan perilaku manusia, al-Farabi berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, disebabkan oleh banyak faktor masyarakat-masyarakat yang sempurna, menurut al-Farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna : masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang dan masyarakat sempurna kecil. Di samping itu al-Farabi juga berpendapat adanya masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna. Negara yang utama, menurut al-Farabi terdapat bermacam-macam Negara. Pimpinan Negara, al-Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga Negara mampu dan dapat menjadi kepala Negara.

Buku kedua, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, yang ditulis oleh Noor Arif Maulana. Menguraikan tentang Revolusi Islam Iran dan konstelasi politik yang terus berubah, Sejarah Iran di masa rezim Syah Pahlevi, Profil

²⁵ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan; 1996), 69.

kehidupan Ayatullah Khomeini dan konstruksi Ideologi Syi'ah, Pandangan Agama-politik Ayatullah Khomeini dan masalah yang dihadapinya, Khomeini dan penempatan konsep Vilayat-I Faqih di Iran.

Skripsi yang di tulis oleh Abdus Salam tahun 1999. Fakultas Syari'ah, dengan judul *Pemikiran al-Farabi tentang Kepemimpinan Negara*. Dalam skripsi ini dijelaskan semua pemikiran al-Farabi tentang kepemimpinan Negara.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rasyida Asmad tahun 2000. Fakultas Adab, dengan judul *Wilayah Faqih: Pemikiran Politik Ayatullah Khomeini*. Dalam skripsi ini dijelaskan semua konsep wilayah faqih dalam pemikiran politik Ayatullah Khomeini.

Dalam uraian di atas maka dapat dilihat bahwa belum ada buku ataupun skripsi yang membahas tentang perbandingan konsep Negara al-Farabi dan Khomeini dalam bentuk pemerintahan dan bentuk Negara, walaupun dalam buku Islam dan tata Negara, tetapi dalam buku itu tidak diuraikan tentang perbedaan dan persamaan konsep Negara al-Farabi dengan konsep Negara Khomeini. Begitu juga dalam buku ini di jelaskan tentang antara al-Farabi dan Khomeini yang ditulis oleh Yamani menerangkan tentang filsafat politik al-Farabi dan Khomeini, tetapi juga tidak dijelaskan tentang perbedaan dan persamaan konsep Negara al-Farabi dengan Khomeini. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Abdus Salam dan Rasyida Asmad belum aca konsep perbandingan al-Farabi dengan Khomeini. Maka penulis mencoba memperbandingkan dengan judu konsep Negara al-Farabi dan Khomeini.

H Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penelitian ini digunakan penelitian Kepustakaan (Bibliographic Research).

2. Data yang akan dihimpun

- a. Data tentang riwayat hidup al-Farabi dan Khomeini.
- b. Data tentang situasi politik semasa hidup al-Farabi dan Khomeini.
- c. Data tentang Karier politik al-Farabi dan Khomeini.
- d. Data tentang pendidikan al-Farabi dan Khomeini.
- e. Data tentang karya-karya al-Farabi dan Khomeini.

3. Sumber Data

Sumber data untuk seluruh data-data diatas secara global meliputi :

Data primer :Yaitu karya tulis asli yang tidak merupakan penafsiran, ringkasanmaupun analisa. Seperti :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. *Arah ahl al-Madinah al-Fadhilah*, al-Farabi;
- b. Sistem Pemerintahan Islam, Khomeini.

Data sekunder : Yaitu bentuk informasi yang menunjukkan informasi primer atau literatur asli yang biasanya merupakan modifikasi seleksi atau disusun kembali untuk tujuan tertentu. Seperti :

- a. Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih, Noor Arif Maulana;
- b. Hirarki Ilmu, Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu menurut : Al-Farabi, Al Ghazali, Qutub al-Din al-Syirazi, Osman Bakar;

- c. Islam dan Tata Negara, Munawir Sjadzali;
- d. Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam, Yamani;
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- e. Para Perintis Zaman Baru Islam, Ali Rahnema.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, akan digunakan tehnik analisa yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan gejala-gejala konkrit. Adapun tehnik analisa data dalam skripsi ini menggunakan :

- a. Metode Deduktif, yakni mengemukakan beberapa teori dan dalil hubungan konsep Negara yang bersifat umum. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus.²⁶
- b. Metode Komparatif, metode ini digunakan untuk membandingkan konsep Negara menurut Al-Farabi dengan Khomeini.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum, yang memuat pola dasar penulisan proposal skripsi ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Definisi Operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 58.

²⁷ Ibid, 47.

Bab II : Merupakan gambaran umum tentang al-Farabi dan Khomeini yang meliputi

riwayat hidup, karya-karya, dan karier politik al-Farabi dan Khomeini.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab III : Merupakan penelitian yang berisi tentang konsep al-Farabi dan Khomeini tentang konsep Negara (bentuk pemerintahan dan bentuk Negara).

Bab IV: Merupakan analisa dari latar belakang konsep al-Farabi dan Khomeini tentang pengertian negara serta bagaimana persamaan dan perbedaan konsep negara antara al-Farabi dan Khomeini.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

AL-FARABI DAN KHOMEINI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. AL-FARABI

1. Biografi

Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalagh. Di kalangan orang-orang latin abad pertengahan, al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Nashr (Abunaser). Ia lahir di Wasij, distrik Farab (sekarang dikenal dengan kota Atrar), Turkistan pada tahun 257 H (870 M). Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki.¹

Al-Farabi hidup pada zaman kekuasaan Abbasiyah yang diguncang oleh berbagai gejolak, pertentangan dan pemberontakan. Dia lahir pada masa pemerintahan Khalifah Mu'tamid dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Muti', suatu periode paling kacau dan tidak ada stabilitas politik sama sekali. Pada waktu itu, timbul banyak macam tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai motif: agama, kesukuan dan kebendaan. Banyak anak-anak raja dan penguasa-penguasa lama berusaha mendapatkan kembali wilayah dan kekayaan nenek moyangnya, khususnya orang-orang Persia dan Turki.²

Sejak kecil al-Farabi suka belajar, dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turkistan dan

¹ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2001), Cet.II, 32.

² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993),50.

Kurdistan. Nampaknya ia tidak mengenal bahasa Yunani dan Suryani yaitu bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat pada waktu itu.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk memulai karir dalam pengetahuannya, ia hijrah dari negerinya ke kota Baghdad, yang pada waktu itu disebut sebagai kota ilmu pengetahuan. Dia belajar di sana selama kurang lebih dua puluh tahun. Ia betul-betul memanfaatkan untuk menimba ilmu pengetahuan kepada : Ibnu Suraj untuk belajar tata bahasa Arab, Abu Bisyr Matta Ibn Yunus untuk belajar ilmu mantiq (logika).⁴

Mekipun dalam sumber-sumber tertentu ayahnya disebut keturunan bangsawan Persia, namun keluarga al-Farabi dinggap sebagai orang Turki. Bukan hanya karena mereka berbicara dalam bahasa Songdia atau sebuah dialek Turki, tetapi karena gaya hidup dan kebiasaan kultural mereka mirip orang Turki. Bahwa al-Farabi mestinya – paling tidak – berasal dari keluarga terhormat, kalau bukan dari keluarga yang kaya, juga ditegaskan oleh D.M. Dunlop. Pendapat itu didasarkan atas pertimbangannya tentang nama kakek al-Farabi, Tarkhan, yang dalam bahasa Turki digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bukan hanya menunjukkan nama seorang pejabat militer tetapi juga berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan dan hak-hak feodal tertentu. Jika memang demikian, maka tradisi keluarga dengan karier militer menonjol yang agaknya baru saja ditegaskan, dilanggar ketika al-Farabi yang berbakat intelektual menyebel dari tradisi

³ Ahmad Syadali, Mudzakir, *Filsafat Umum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia; 1997), 168.

⁴ H.A.Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia; 1997), 126.

itu dan memilih kehidupan ilmiah. Sebagaimana dipaparkan oleh Ibn Abi Usaib'ah, ayah al-Farabi ternyata juga seorang pejabat militer.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun 330 H (945 M), ia pindah ke Damaskus, dan berkenalan dengan Saif al-Daulah al-Hamdani, Sultan Dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali, tetapi al-Farabi lebih memilih hidup sederhana (zuhud) dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Ia hanya memerlukan empat dirham saja sehari untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi, hal yang menggembirakannya di tempat yang baru ini, al-Farabi bertemu dengan para sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Konon, kegemaran membaca dan menulisnya sering dilakukannya di bawah sinar lampu penjaga malam. Adapun sisa tunjangan jabatan yang diterimanya, dibagi-bagikan kepada fakir-miskin dan amal sosial di Aleppo dan Damaskus. Lebih kurang 10 tahun al-Farabi hidup di dua kota itu secara berpindah-pindah. Tetapi hubungan penguasa kedua kota ini semakin memburuk, sehingga Saif al-Daulah menyerbu kota Damaskus yang kemudian dapat dikuasai. Dalam penyerbuan ini al-Farabi diikutsertakan.⁶

Pada bulan Rajab 339 H/ Desember 950 M, al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada usia delapan puluh tahun. Dia dimakamkan di pekuburan yang terletak di luar gerbang kecil kota (*al-bab al-shaghir*) bagian selatan. Saif al-Daulah

⁵ Osman Bakar, *Hierarki Ilmu : Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi*, (Bandung: Mizan; 1997), 26-27.

⁶ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2001), 33.

sendirilah yang memimpin sejumlah pejabat istana dalam upacara pemakaman al-Farab, salah satu sarjana yang pertama sekaligus anggota paling terkenal dari "lingkaran Saif al-Daulah".⁷

Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya dengan sempurna, sehingga filsuf yang datang sesudahnya, seperti Ibn Sina dan Ibn Rusyd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Pandangannya yang demikian mengenai filsafat, terbukti dengan usahanya untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dengan Aristoteles lewat risalahnya *Al-Jam' al-baina Ra'yay al-Hakimain Aflathun wa Aristhu*. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibn Sina telah membaca 40 kali buku metafisika karangan Aristoteles, bahkan hampir seluruh isi buku itu dihapalnya, tapi belum dipahaminya. Barulah Ibn Sina memahami benar filsafat Aristoteles setelah membaca buku al-Farabi, *Tahqiq Ghardh Aristhu fi Kitab ma Ba'da al-Thabi'ah* yang menjelaskan tujuan dan maksud metafisika Aristoteles. Pengetahuannya yang mendalam mengenai filsafat Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, ia dijuluki al-Mu'allim al-Tsani (guru kedua), sedangkan al-Mu'allim al-Awwal (guru pertama) adalah Aristoteles.⁸

2. Pendidikannya

Pada waktu mudanya, al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Bagdad kepada Abu Bakar al-Saraj, dan logika serta filsafat kepada Abu Bisyr

⁷ Op.cit, *Hierarki ilmu ...*, 37.

⁸ Op.cit, *Filsafat Islam*, 33.

Mattitus Ibn Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan kepada Yuhana ibn Hailam. Setelah di Bagdad al-Farabi pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhana ibn Jilad. Tetapi tidak beberapa lama, al-Farabi kembali ke Bagdad untuk memperdalam filsafat. Di Bagdad al-Farabi menetap selama 20 tahun.⁹

Dengan demikian pendidikan al-Farabi di tempuhnya dengan cara berpindah dari tempat kelahirannya ke suatu Negara lain hanya untuk menimba ilmu.

3. Karyanya

Tampaknya al-Farabi menulis seluruh karyanya dalam bahasa Arab. Sebagian besar karyanya itu – menurut salah satu kajian, berjudul empat puluh – difokuskan pada kajian mengenai logika. Karyanya yang menarik dan penting dalam kategori ini adalah tulisan-tulisannya mengenai hadis Nabi Saw., yang dikumpulkannya dengan tujuan untuk mendemonstrasikan bahwa sesungguhnya hadis-hadis tersebut menganjurkan seni logika Aristoteles.

Karya-karyanya yang lain meliputi cabang filsafat yang lain, yakni fisika atau filsafat alam (*natural philosophy*), termasuk psikologi. Disamping beberapa karya yang dikhususkan untuk menyangkal pandangan-pandangan beberapa filosof dan ahli teologi tertentu tentang fisika.

Di bidang matematika, dia menulis komentar atas karya Phythagoras dan Ptolemeus. Namun, karyanya yang terpenting di bidang ini justru mengenai musik. Yang terpenting di antaranya adalah Al-Musiqa Al-Kabir. Karya al-Farabi yang satu

⁹ Hasyimsyah, *Filsafat Islam*, , 32.

ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai karya terbaik di bidang musik yang pernah ditulis orang di Abad Pertengahan. Khusus di bidang musik ini, al-Farabi adalah seorang komposer dan pemain musik sekaligus.¹⁰

Di samping karya yang disebutkan di atas, karya al-Farabi lainnya, antara lain :

- a. *Al-Millat al-Fadhilah (Komunitas Utama);*
- b. *Fushul al-Madani (Semboyan Negarawan);*
- c. *Talkhish Nawamis Afathun (Ringkasan Hukum-hukum Plato);*
- d. *Risalah fi al-Siyasah (Ringkasan tentang Politik);¹¹*
- e. *Syuruh Risalah Zaimun al-Kabir al-Yunani;*
- f. *Al-Ta'liqat;*
- g. *Risalah fima Yajibu Ma'rifat Qabla Ta'allumi al-Falsafah;*
- h. *Kitab Tahshil al-Sa'adah (Pencapaian Kebahagiaan);*
- i. *Risalah fi Itsbat al-Mufaraqah;*
- j. *'Uyun al-Masa'il;*
- k. *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (pendapat-pendapat para Warga Kota Utama);*
- l. *Ihsha' al-'Ulum wa al-Ta'rif bi Aghradiha;*
- m. *Maqalat fi Ma'ani al-Aql;*
- n. *Fushul al-Hukm;*
- o. *Risalah al-'Aql;*

¹⁰ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan; 2002), 57-58.

¹¹ Osnan Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, Quthb al-Din al-Syirazi*, (Bandung: Mizan ;1997),45.

p. *Al-Siyasah al-Madaniyah (Pemerintahan Negara Kota);*

q. *Al-Masa'il al-Falsafiyah wa al-Ajwibah 'anha;*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

r. *Al-Ibanah 'an Ghardi Aristo fi Kitabi ma Ba'da al-Thabi'ah.*

Karya-karya politik al-Farabi di atas memberikan pengaruh yang besar atas banyak pemikir Muslim dan Yahudi, khususnya sejak abad ke-13. Ibn Rusyd yang paling banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Farabi di bidang ini, membela tesis al-Farabi tentang kenabian dari serangan al-Ghazali.

4. Latar Belakang dan Karier Politik

Konsep al-Farabi tentang kenegaraan tersebut terkesan ideal sebagaimana halnya konsepsi kenegaraan yang ditawarkan oleh Plato. Hal ini dimungkinkan, al-Farabi tidak pernah memegang suatu jabatan pemerintahan, ia lebih menyenangi berkawal, menyendiri, sehingga ia tidak mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan. Kemungkinan lain yang melatarbelakangi konsep Negara al-Farabi itu adalah situasi pada waktu itu, kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak, pertentangan dan pemberontakan dengan berbagai motivasi, antara lain : aliran, kesukuan dan kebendaan. Dan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Mu'tamid dan wafat pada masa pemerintahan Khalifah Muti'.¹²

Kehidupan al-Farabi banyak terbenam dalam dunia ilmu sehingga tidak dekat dengan penguasa Abbasiyah. Dalam pada itu teori kenegaraannya tidak didasarkan

¹² Hasyimsyah, *Filsafat Islam*, , 43.

pada sistem pemerintahan yang ada, melainkan obyektif sesuai dengan idealismenya.

Filsafat kenabian itulah yang tampak erat dengan teori kenegaraannya.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam karyanya "Ara ahl Madinah a-Fadhilah", kepala Negara utama menurut al-Farabi berperan sebagai guru (*mu'allim*), pembimbing, pengendali, dan pembuat undang-undang dan peraturan. Hal ini karena manusia pada wataknya tidak dapat dengan sendirinya mengetahui kebahagiaan dan hal-hal lain yang pantas diketahui, sehingga ia perlu kepada guru pembimbing yang mampu berhubungan dengan Akal Aktif untuk menerima makrifah atau wahyu.

Menurut Hans Daiber justru melihat pengaruh konsep Ismailiyah terhadap konsep al-Farabi tentang universalitas perlambang-perlambang keagamaan dan tamsil-tamsil dibalik bentuk lahiriah kelas-kelas masyarakat dalam Negara utama al-Farabi.

Menurut Ahmad Daudy di sini jelas kelihatan pengaruh Syi'ah, terutama Syi'ah Ismailiyah pada al-Farabi. Sistem sosialnya dibangun berdasarkan konsep perbandingan alam macro dengan alam micro, sehingga keperluan kepada adanya seorang guru atau imam merupakan sesuatu yang esensial bagi masyarakat. Konsepsinya tentang masyarakat sempurna berwatak macro-cosmos yang berada di bawah pimpinan seorang imam, seperti konsep politik Syi'ah.¹⁴

Menurut Ibn Abi Usaibi'ah dan Al-Qifti, al-Farabi pergi ke Suriah pada 942 M. Menurut Ibn Abi Usaibi'ah di Damaskus al-Farabi bekerja di sing hari sebagai

¹³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

¹⁴ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 52.

tukang kebun, dan pada malam hari belajar teks-teks filsafat dengan memakai lampu jaga. Al-Farabi terkenal sangat saleh dan zuhud. Al-Farabi tidak memedulikan hal-hal dunia ini. Menurut Ibn Abi Usaibi'ah, al-Farabi membawa manuskripnya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadhilah – manuskrip ini mulai ditulisnya di Baghdad – ke Damaskus. Di Damaskus inilah manuskrip tersebut diselesaikannya pada 942-943 M.¹⁵

Pada tahun 330 H (945 M), ia pindah ke Damaskus, dan berkenalan dengan Saif al-Daulah al-Hamdani, Sultan Dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali, tetapi al-Farabi lebih memilih hidup sederhana (zuhud) dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Ia hanya memerlukan empat dirham saja sehari untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi, hal yang mengembirakannya di tempat yang baru ini, al-Farabi bertemu dengan para sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Konon, kegemaran membaca dan menulisnya sering dilakukannya di bawah sinar lampu penjaga malam. Adapun sisa tunjangan jabatan yang diterimanya, dibagi-bagikan kepada fakir-miskin dan amal sosial di Aleppo dan Damaskus. Lebih kurang 10 tahun al-Farabi hidup di dua kota itu secara berpindah-pindah. Tetapi hubungan penguasa kedua kota ini semakin memburuk, sehingga Saif al-Daulah menyerbu kota

¹⁵ Ibid. *Antara Al-Farabi dan Khomeini*, 56.

Damaskus yang kemudian dapat dikuasai. Dalam penyerbuan ini al-Farabi diikutsertakan.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Farab. wafat di Damaskus pada 950 M. Usianya pada saat ini sekitar delapan puluh tahun. Al-Qifti mengatakan bahwa al-Farabi meninggal ketika sedang dalam perjalanan menuju Damaskus bersama Saif al-Daulah. Menurut informasi, Saif al-Daulah dan beberapa anggota istananya melakukan upacara pemakamannya.¹⁷

B. KHOMEINI

1. Biografi

Nama asli Ayatullah Khomeini adalah Ruhollah Mousavi lahir di Khomein (Iran) pada 24 Oktober 1902 - Wafat Teheran pada 4 Juni 1989.¹⁸ Khomein, merupakan dusun yang berada di Iran Tengah. Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid Musawi, keturunan Nabi melalui jalur Imam Musa al-Kazhim. Mereka berasal dari Neisyabur, Iran Timur Laut. Pada awal abad ke-18, keluarga ini bermigrasi ke digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id India, dan bermukim di kota kecil Kintur di dekat Lucknow di Kerajaan Qudh.¹⁹

Kakek Imam Khomeini yang bernama Sayyid Ahmad Musawi Hindi, lahir di Kintur. Keluarga kakeknya adalah keluarga ulama terkemuka, Mir Hamed Husein Hindi Neisyaburi, yang karyanya *Abaqat al-Anwar*, jadi kebanggaan umat Islam di

¹⁶ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2001), 33.

¹⁷ Op.cit., *Antara Al-Farabi dan Khomeini*, 57.

¹⁸ Penambahan huruf i di belakang namanya, Khomeini, menunjukkan bahwa ia berasal dari kota Khomein, kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Arak (Iran bagian tengah). Adapun kata Ayatullah atau Ayatullah al-Uzma di depan namanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama terkemuka dalam masyarakat Syi'ah Dua belas. Lihat *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve; 1997), cet. IV, 52-53.

¹⁹ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan; 1996), 69-70.

India. Sayyid Ahmad meninggalkan India pada sekitar tahun 1830 M untuk berziarah ke kota suci Najaf, Irak. Di Najaf, dia bertemu seorang saudagar terkemuka dari Khomein. Menerima undangan sang saudagar, Sayyid Ahmad lalu pergi ke Khomein untuk jadi pembimbing spiritual di dusun itu.

Di Khomein, Sayyid Ahmad menikah dengan Sakinah, putri tuan rumahnya. Pasangan ini dikaruniai empat anak, antara lain Sayyid Mustafa, yang lahir pada 1856 M. Sayyid Mustafa belajar di Najaf, dibawah bimbingan Mirza Hasan Syirazi, kemudian pada 1894 kembali ke Khomein. Di sana dia menjadi ulama dan dikaruniai enam anak. Imam Khomeini adalah yang bungsu. Ketika Imam masih berusia sembilan bulan, ayahnya dibunuh karena menentang Dinasti Qajar.

2. Pendidikannya

Semasa kecil, Khomeini mulai belajar bahasa Arab, syair Persia, dan kaligrafi di sekoah negeri dan di maktab. Menjelang dewasa, Khomeini mulai belajar agama dengan lebih serius. Ketika berusia lima belas tahun, dia mulai belajar tata bahasa Arab kepada saudaranya, Murtaza, yang belajar bahasa Arab dan teologi di Isfahan. Pada usia tujuh belas tahun, Khomeini pergi ke Arak, kota dekat Isfahan untuk belajar dari Syekh Abdul Karim Haeri Yazdi, seorang ulama yang terkemuka yang meninggalkan Karbala untuk menghindari pergolakan politik. Sikap ini yang kemudian mendorong kebanyakan ulama terkemuka untuk menyatakan penentangannya kepada pemerintahan Inggris.

Setelah runtuhnya imperium Utsmaniah, Syekh Haeri enggan tinggal di kota-kota yang ada di bawah mandat Inggris. Ia kemudian pindah ke Qum. Khomeini, lima

bulan kemudian, mengikuti jejak Syekh Haeri pindah ke Qum. Di tempat yang baru ini, Khomeini belajar retorika syair dan tata bahasa dari gurunya yang bernama Syekh Muhammad Reza Masjed Syahi. Selama belajar di Qum, Khomeini menyelesaikan studi fiqh dan ushul dengan seorang guru dari Kasyan, yang sebelas tahun lebih tua darinya, yaitu Ayatullah Alio Yasrebi.

Selama dalam masa belajar atau pendidikan umum yang diikutinya di Qum, Khomeini berhasil membentuk kepribadian yang agung di bawah bimbingan sejumlah guru besar agama yang cukup mumpuni antara tahun 1922 sampai 1936 (1340-1355 H). Di Qum, Khomeini termasuk seorang murid yang berhasil baik di lingkungannya maupun di luar kegiatan sosial keagamaan. Hobi membacanya sangat memperluas cakrawala pengetahuan yang ada dalam dirinya. Kebiasaan membaca yang tertanam sejak kecil dalam hati sanubari Khomeini inilah yang membuat dirinya sangat kritis dan peka terhadap kondisi sosial yang ada di sekitarnya.

Berikut ini adalah beberapa guru Khomeini yang pernah membimbingnya :

1. Ayatullah Aqa Mirza Muhammad 'Ali Adib Tehrani (1302-1396 H atau 1884-1949). Seorang penulis buku "*Sharf al-Sharf*" mengenai tata bahasa Arab dan "Hasyiyah" mengenai Mughnil al-Labib. Beliau juga penyunting *Mafatih al-Jinan* dan yang mengajarkan kitab *Muthawwal*, tentang gramatikal atau sintaksis bahasa Arab, fiqh dan ushul pada lembaga pendidikan agama atau Hauzah di Qum kepada Khomeini.
2. Ayatullah Aqa Mirza Sayyid 'Ali Yatsrib Kasyani (1311-1379 H atau 1893-1959) murid Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi, Sari'at Isfahani, Aqa Dhiya

'uddin 'Iraqi dan Mirza Na'ini yang datang ke Qum tahun 1341 H/ 1923 M atas undangan Ayatullah Ha'iri dan menetap di sana, sehingga ia pindah ke Isfahan pada tahun 1347 H/ 1928 M. Ia adalah guru Khomeini tentang ilmu fikih dan ushul tingkat awal (suthuh).

3. Ayatullah Hajj Sayyid Muhammad Taqi Khwansari (1305-1371 H atau 1887-1951) murid Akhund Khurasani, Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi, Syari'at Isfahani, Aqa Dhiya'uddin 'Iraqi dan Mirza Na'ini dan Hajj Syaikh 'Ali Khuchani. Ia adalah guru Khomeini dalam bidang ilmu fikih.
4. Ayatullah Hajj Syeikh 'Abdul Karim Ha'iri Yazdi (1276-1355 H atau 1859-1936) murid Mirza Muhammad Hasari Khurasani, Mirza Syirazi Kuchak dan Sayyid Muhammad Fisyaraki telah mengajarkan ilmu fikih dan ushul tingkat lanjutan kepada Khomeini antara tahun 1345-1355 H atau 1926-1936). Pada tahun 1937, ketika Ha'iri Yazdi meninggal dunia, Khomeini telah menjadi salah seorang tokoh ulama terkemuka dan dikenal alim yang genius.
5. Ayatullah Aqa Mirza Muhammad 'Ali Syahabadi (1292-1373 H atau 1875-1953). Murid para ahli fikih seperti Mirza Hasyim Khwansari, Hajj Mirza Hasan Asyiyani, Akhund Khurasani, Syari'at Isfahani, Mirza Muhammad Taqi Syirazi dan para filosof seperti Mirza Hasyim Gilani dan Mirza Abu al-Hasan Jalwah. Di antara karya-karyanya adalah *Rasyahat al-Bihar*, *Syadzarat al-Ma'arif* dan *Miftah al-Sa'adah*. Selama tujuh tahun hidupnya, Khomeini belajar tasawuf atau 'Irfan seperti Manzhumah-nya Sabzawari dan Asfar-nya Mulla Shacra. Khomeini juga belajar karya Qaishari, *Syarh al-Fushush* yang

merupakan penjeasan atas karya tasawuf terbesar karya Ibn 'Arabi, *Fushush al-Hikam*. Khomeini juga memperdalam *Mafatih al-Ghayb*-nya Muhammad bin Hamzah dan karya Khawajah Abdullah Anshari, *Manazil al-Sa'irin* di bawah bimbingan Ayatullah Syahabadi. Dalam pendapatnya, Khomeini sering menukil Ayatullah Syahabadi dengan rasa hormat dalam karya-karyanya seperti : *Mishbah al-Hidayah, Chihil Hadits, dan Ta'liqah 'ala Syarh al-Fushush al-Uns*.

6. Ayatullah Hajj Aqa Husain Burujerdi (1292-1380 H atau 1875-1960) murid Sayyid Muhammad Baqir Darcheh'I, Jahangir Khan Qasyqa'I, Akhund Khurasani, Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi dan Syari'at Isfahani. Beliau merupakan Marja', pemimpin tertinggi atau imam kaum Syi'ah terkemuka pada saat itu, menggantikan Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan Isfahani di Najaf 6 Dzulhijjah 1366/ 1947 dan empat tahun kemudian menyusul Ayatullah Hajj Aqa Husain Qummi di Karbala Rabiul Awal 1366/ 1947. Khomeini memperdalam ilmu fikih dan ushul kepadanya.
7. Ayatullah Hajj Mirza Jawad Maliki Tabrizi, meninggal pada tahun 1343 atau 1924, murid Aqa Ridla Hamadani, Akhund Khurasani, dan Mulla Husain Quli Hamadani. Di antara karyanya adalah *Asrar al-Shalat, al-Muraqabat, Liqa' Allah dan Hasyiyah 'ala Ghayat al-Qushwa*. Khomeini belajar akhlak bersama dengan murid pilihan secara khusus di rumahnya dan pelajaran di Madrasah Faydliyyah untuk peserta yang lebih umum.

8. Ayatullah Aqa Mirza 'Ali Akbar Hakami Yazdi, meninggal pada tahun 1344 H atau 1925, murid Jahangir Khan Qasyqa'i dan Aqa Muhammad Ridla Qum-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sye'i. Beliau mengajarkan *al-Ashfar* karya Mulla Shadra, *Manzhumah* karangan Mulla Hadi Sabzawari, dan *Syarh al-Fushush*-nya Qaisyari, disamping memberikan pelajaran matematika dan astronomi. Karya risalahnya : *Mahiyyat wa Wujud, Ma'rifat al-Nafs wa Ma'rifat al-Rabb, Fann-e Masahat*.
9. Ayatullah Hajj Sayyid Abu al-Hasan Raffi' Qazwini (1315-1396 H atau 1897-1976) murid Sayyid Muhammad Tunekabuni dan Mirza Hasan Kirmansyahi. Karyanya antara lain : *Risalah-ye Raj'at, Risalah-ye Mi'raj, Risalah-ye Ittihad-e 'Aaqil beh Ma'qul*. Beliau mengajar fikih, filsafat dan pelajaran seperti : *Makasib, Rassa'il, Kifayah*. Khomeini secara khusus belajar *Sayrh-e Manzhumah*-nya Mulla Hadi Sabzawari dan sebagian *al-Ashfar*-nya Mulla Shadra kepadanya.
10. Ayatullah Hajj Syaikh Muhammad Ridla Najafi Isfahani (1287-1362 H atau 1870-1943) di antara 30 karya tulisnya adalah *Wiqayat al-Adzhan, Naqd-e Fa'safah-ye Darwin, Amjadiyyah* dan koleksi puisi (diwan). Khomeini beserta murid lainnya mendapatkan pelajaran tentang kritik terhadap teori Darwin. Khomeini juga sering mengutip bagian besar dari risalahnya *Raudhat al-Ghina'* dalam karyanya sendiri *al-Makasib al-Muharramah*. Hal ini dilakukan untuk mengenang dan memberi rasa hormat kepada guru atau Syaikh Muhammad Ridla, seperti disebutkan pada permulaan *Chihil Hadits*.

11. Ayatullah Sayyid Abu al-Qasim Dehkurdi Isfahani (1272-1353 H atau 1855-

1934) murid Mirza Muhammad Hasan Syirazi, Syaikh Zainal 'Abidin
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Manzandarani dan Hajj Mirza Husain Nuri, salah satu mujtahid terkemuka

yang tinggal di Isfahan. Hajj Kalsabi, dalam bukunya mencantumkan enam

belas dari karya-karya tulisnya. Khomeini mencantumkan namanya di antara

para ahli hadits.

12. Ayatullah Sayyid Muhsin al-Amin al-'Amili (1285-1372 H atau 1855-1934).

Penulis buku *A'yan al-Sy'ah* dan salah satu ahli hadits. Beliaulah yang

memberikan izin (ijazah) kepada Khomeini untuk meriwayatkan hadits.²⁰

13. Ayatullah Hajj Syaikh 'Abbas Qummi (1294-1359 H atau 1877-1940) ahli

hadits terkemuka dan sejarawan Iran, murid dari Muhaddits Nuri dan penulis

Safinat al-Bihar, *Mafatih al-Jinan* dan beberapa karya lainnya. Khomeini

memperdalam ilmu hadits kepada beliau yang dikenal sebagai ahli hadits dan

termasuk salah seorang yang di sebut Khomeini dalam *Chihil Hadits*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika di lihat dari daftar guru Khomeini di atas, maka dapat diketahui bahwa

minat pengetahuannya dalam khazanah kailmuan, keislaman khususnya sangat luas

dan tinggi. Khomeini menerima pendidikan istimewa tidak hanya dalam fikih, ushul,

²⁰ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 73-78. Pada awal tahun 1930-an, dia menjadi mujtahid dan menerima ijazah untuk menyampaikan hadis dari empat guru terkemuka. Yang pertama dari keempat guru itu adalah Syekh Muhsin Amin Ameli, seorang ulama terkemuka dari Libanon. Yang kedua adalah Syekh Abbas Qummi, ahli hadis dan sejarawan terkemuka. Qummi adalah penulis buku *Mafatih al Jinan* (Kunci Surga). Guru ketiganya adalah Abul Qasim Dehkordi Isfahani, seorang mullah terkemuka di Isfahan. Guru keempatnya adalah Muhammad Reza Masjed Syahi, yang datang ke Qum pada tahun 1925 karena protes menentang kebijakan Syah Reza yang anti-Islam. Lihat Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra; 2002), 10.

hadits, al-Qur'an dan ilmu akhlak, tapi juga di bidang pengetahuan ilmu-ilmu modern seperti astronomi dan matematika. Tidak heran apabila dikemudian hari dalam usia yang relatif muda, yaitu 27 tahun, Khomeini telah dapat memberikan pelajaran filsafat dan metafisika kepada murid-muridnya yang mempunyai kapasitas intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Dan telah menulis buku-buku tentang berbagai segi agama.

Pada awal tahun 1930-an, dia menjadi mujtahid dan menerima ijazah untuk menyampaikan hadis dari empat guru terkemuka. Yang pertama dari keempat guru itu adalah Syekh Muhsin Amin Ameli, seorang ulama terkemuka dari Libanon. Yang kedua adalah Syekh Abbas Qummi, ahli hadis dan sejarawan terkemuka. Qummi adalah penulis buku *Mafatih al Jinan* (Kunci Surga). Guru ketiganya adalah Abul Qasim Dehkordi Isfahani, seorang mullah terkemuka di Isfahan. Guru keempatnya adalah Muhammad Reza Masjed Syahi, yang datang ke Qum pada tahun 1925 karena protes menentang kebijakan Syah Reza yang anti-Islam.

Pada usia 27 tahun, Khomeini menikah dengan Syarifah Batul, putri dari seorang ayatullah yang bermukim di Teheran. Mereka dikaruniai 5 orang anak, 2 putra dan 3 putri.

Imam Khomeini wafat pada tanggal 3 Juni 1989 dengan memberikan sesuatu keyakinan kepada kaum Muslim di seluruh dunia bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang mampu menuntun manusia menuju kebenaran. Memang, peran dan kharismanya dalam Islam modern dan sejarah Iran tak dapat disangkal. Semoga

harapan dan cita-citanya dapat menjadi kenyataan dalam sejarah umat Islam di dunia.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Karyanya

Karya-karya Khomeini, baik yang ditulisnya secara langsung maupun hasil sutingan murid-muridnya yang disusun dari ceramah-ceramah Khomeini, baik selama di Iran maupun ketika berada di Turki dan Irak, berjumlah 25 buku. Karya-karya Khomeini yang menonjol di antaranya adalah :

1. *Kasyf Al-Asrar* (pengungkapan Rahasia-Rahasia);²²
2. *Al-Hukumah Al-Islamiyah* atau *Wilayat-e-Faqih* (tentang Pemikiran-Pemikiran Politik).²³
3. *Tahrir al-Wasilah* (tentang hukum dan fikih);
4. *Kitab al-Bai'* (tentang Fikih);²⁴
5. *Jihad Akbar* (tentang Akhlak).²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Latar Belakang dan Karier Politik

Jika dilihat dari beberapa karya Khomeini di atas, pandangan dan sikapnya itu merupakan manifestasi dan keyakinan tauhid yang membebaskan dari kesombongan dan ego dirinya. Karena itu individualitasnya telah melebur dengan tujuan yang lebih

²¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Terjemahan edisi bahasa Inggris "Islamic Government" oleh Dr. Hamid Algar), (Jakarta: Pustaka Zahra; 2002), 9-10.

²² Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan; 2002), 112.

²³ *Ibid*, *Antara Al-Farabi*, 114.

²⁴ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 121.

²⁵ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve; 1997), 55.

tinggi yaitu mengenai ajaran Islam mazhab Syi'ah yang ada pada diri dan kehidupannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai kezaliman, penindasan rezim Reza Syah, Khomeini menyatakan bahwa hanya hukum Allah SWT yang akan tetap bertahan terhadap perusakan waktu. Khomeini bukan saja mengkritik pedas Reza Syah, tetapi kaum ulama Syi'ah juga yang apatis terhadap situasi sosial-politik di Iran. Hal itu tercermin dalam bukunya *Kasyful Asrar*. Khomeini menyerukan bahwa agar para mullah melibatkan diri dalam dunia politik dan menyelamatkan integritas kultur Syi'ah dan harus mengendalikan pemerintahan di Iran. Tapi tidak berarti kaum mullah harus menjadi Syah, seorang menteri atau panglima militer. Namun, mereka harus mampu mengawasi badan-badan legislatif, dan eksekutif dalam sebuah negara islam.

Persatuan dan perdamaian memang sangat dicintai oleh Khomeini. karena itu, Khomeini sangat prihatin terhadap perpecahan yang menimpa umat Islam. Ia menyarankan untuk meninggalkan segala bentuk fanatisme kelompok, golongan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mazhab dan sebagainya yang itu justru akan memperlemah posisi Islam sendiri. Khomeini meminta agar umat Islam mengedepankan kepentingan bersama Islam.²⁶

Setelah runtuhnya imperium Utsmaniah, Syekh Haeri enggan tinggal di kota-kota yang ada di bawah mandat Inggris. Ia kemudian pindah ke Qum. Khomeini, lima bulan kemudian, mengikuti jejak Syekh Haeri pindah ke Qum. Di tempat yang baru ini, Khomeini belajar retorika syair dan tata bahasa dari gurunya yang bernama Syekh

²⁶ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 123-124.

Muhammad Reza Masjed Syahi. Selama belajar di Qum, Khomeini menyelesaikan studi fiqh dan ushul dengan seorang guru dari Kasyan, yang sebelas tahun lebih tua darinya, yaitu Ayatullah Alio Yasrebi.²⁷

Sepanjang belajar di Qum, Khomeini juga sangat sadar akan perkembangan-perkembangan politik yang terjadi di Iran dan di negeri-negeri Islam. Hal itu terlihat jelas dalam tulisan maupun pidato-pidatonya tentang pemikiran politik yang berkaitan dengan pengetahuan sejarah Islam. Khomeini dalam salah satu pidatonya mengatakan:

"Sesungguhnya kita tidak mengetahui atas tujuan apa adanya perpecahan dan bergolong-golongan itu. Adakah perpecahan itu tercetus karena kepentingan dunia saja atau perkara manakah (politik, budaya) yang menyebabkan saudara berpecah-belah karena dunia. Wahai orang yang menyeru ke jalan Allah SWT, yang ingin mengikuti Rasulullah Saw, dan kepemimpinan Amirul-Mu'minin 'Ali bin Abi Thalib kw. Atau sekurang-kurangnya yang memperhatikan sedikit banyak sejarah hidupnya, niscaya dapat melihat bahwa saudara telah terlalu jauh dari corak kepemimpinan beliau dan perjalanan hidupnya".²⁸

Pada usia dua puluh tujuh tahun, Khomeini memasuki politik ulama, dan mulai memiliki kelompok pelajar yang mengaguminya. Dia kurang memperhatikan diskusi yang dimaksudkan untuk sekedar diskusi. Dia mengemukakan topik dengan

²⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra; 2002), 10.

²⁸ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 73-78.

cara yang jelas dan mantap, pertama dengan menjelaskan pendapat lain mengenai topik itu, dan kemudian pendapatnya sendiri, sebelum mencari argumen.²⁹

Pandangan atau pikiran Khomeini secara garis besar dapat diketahui dalam tiga dasar yang menjadi ideologi kaum Syi'ah, yaitu; *pertama*, kepemimpinan (imamah) – salah satu dari rukun iman dalam pandangan Syi'ah, disamping Keimanan terhadap Allah SWT yang Esa (Tauhid), Kenabian (Nubuwah), Keadilan ('Adalah), dan Keyakinan terhadap hari Akhir (Al-Wa'ad) –adalah merupakan bagian terpenting dalam keislaman, karena perbandingan ayat yang berkaitan dengan ibadah dengan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan adalah satu berbanding dengan seratus ayat. Dan dengan sendirinya Kepemimpinan menjadi bagian terpenting dalam upaya kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada sumber hukum Islam; al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, Kesyahidan (pengorbanan), adalah dasar dalam upaya kematian di jalan Allah SWT (fi sabilillah) sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Husein, cucu Rasulullah Saw. yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dalam peristiwa Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 H, beserta 72 pengikutnya.

Ketiga, pembelaan terhadap kaum tertindas atau lemah (Mustadl'afin) dari penindasan kaum yang tiranik (Mustakbirin) untuk mewujudkan suatu Negara atau pemerintahan yang berkadilan bagi seluruh manusia, khususnya umat Islam.³⁰

²⁹ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan; 1996), 81.

³⁰ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 124-125.

Dengan demikian dalam pandangan Khomeini, Negara diartikan sebagai usaha demi kepentingan dan kesejahteraan umum tanpa ada kepentingan individual yang berdasar pada perdamaian dan anti kekerasan yang bersumber pada nilai-nilai Islam.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³¹ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih*, 126.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

NEGARA MENURUT AL-FARABI DAN KHOMEINI

A. DEFINISI UMUM NEGARA

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing "*Staat*" (bahasa Belanda dan Jerman); "*State*" (bahasa Inggris); "*Etat*" (bahasa Prancis). Justru karena pertumbuhan stelsel negara modern dimulai di benua Eropa di sekitar abad ke-17, maka sudah pada tempatnya jika pembahasan ini dimulai dengan penyelidikan asal-usul dan pemakaian kata-kata asing itu di benua Eropa.

Secara etimologis kata "*status*" itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah yang abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap itu. Sejak Cicero (104-43) kata "*status*" atau "*statum*" itu lazim diartikan sebagai "standing" atau "station" (kedudukan) dan dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah "*status civitatis*" atau "*status republicae*". Dari kata Latin klasik ini dialihkan beberapa istilah lainnya di samping istilah "*state*" atau "*staat*" seperti istilah "*estate*" dalam arti dewan atau perwakilan golongan sosial. Dalam arti yang belakangan inilah kata "*status*" semula diartikan dan baru dalam abad ke-16 kata itu dipertalikan dengan kata "negara".¹

¹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), 90-91.

Sejak kata "negara" umum diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi territorial sesuatu bangsa, sejak itu pula kata itu lazim ditafsirkan dalam berbagai-bagai arti. Negara lazim diidentifikasi dengan pemerintah, umpamanya apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara, kemauan negara, dan sebagainya.

Kata itu lazim pula dipersamakan dengan bangsa (*natie*) masyarakat atau pun fiskus (kas negara). Lebih mengacaukan lagi ialah karena kata "negara" juga dipergunakan sebagai istilah yang menunjukkan baik keseluruhan maupun bagian-bagian negara federal – di mana keseluruhan negara federal itu disebut "negara" dan juga komponen-komponennya disebut "negara" (*states*) seperti *the State of New York* juga *the State of California* dan lain sebagainya.²

Melalui metode induktif dapatlah dimengerti bahwa Negara adalah suatu masyarakat politik yang telah memenuhi unsur-unsur Negara, sekurang-kurangnya tiga unsur yang pertama G.S. Diponolo menulis dalam bukunya sebagai berikut :

"Negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu."³

² F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), 92.

³ Max Boli Sabon (Tim Penyusun), *Ilmu Negara : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta, PT. Gramedi Pustaka Utama, 1994), 24-25 .

Rumusan dari G.S.Diponolo tersebut di atas merupakan rangkuman dari beberapa definisi tentang negara dengan melihat unsur-unsur negara. Beberapa definisi tersebut antara lain adalah :

1. Menurut Aristoteles : Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
2. Menurut Prof. Robert Mac Iver : Negara adalah gabungan suatu sistem kelembagaan dengan organisasinya sendiri. Sehingga bila kita membahas tentang negara kita cenderung selalu mengartikan lembaga dari suatu organisasi penyelenggara.
3. Menurut Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
4. Menurut Prof. Sumantri : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.⁴

Menurut Prof.Dr.A.Hoogerwerf negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini, para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Kekuasaan negara diakui oleh para warga dan oleh negara-negara lain,

⁴ Inu Kencana Syafii'ie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), 82-85.

dengan kata-kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi.

Maka ada suatu pimpinan yang diakui dari negara yaitu pemerintahan.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Definisi-definisi di atas bervariasi antara lain menurut pendirian politik dan falsafah hidup dari para penulis. Ciri-ciri negara yang paling banyak disebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dengan demikian Negara terbentuk berdasarkan adanya : sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu, pemerintah yang sah yang mengorganisasikannya dan biasanya mempunyai kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar.⁶

B. KONSEP NEGARA AL-FARABI

a. Negara dalam Sejarah Politik

Di dunia Yunani Kuno kita dapati bahwa Sokrates, yang berbicara dalam buku Republik tulisan Plato, memperlihatkan bagaimana cara membangun sebuah negara idaman yang akan memberikar kepuasan dan kehidupan yang baik bagi manusia. Ia mencoba menggambarkan siapa saja dalam Negara itu yang akan memainkan peranan yang menentukan, apa tugas orang yang bertanggung jawab tentang keamanan dan kemajuan negara itu, dan terutama sekali siapa yang akan menjadi penguasa dalam negara itu. Plato menganggap negara sebagai manusia besar, dan sebaliknya menganggap manusia sebagai negara kecil.

⁵ A.Hoogerwerf, *Politikologi: Pengertian dan Problem-Problemnya*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 64-65.

⁶ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 39.

Dalam merumuskan pengertian Negara ini, Plato mengemukakan adanya analog antara jiwa dan Negara. Hakikat jiwa sebagaimana hakikat Negara. Unsur yang ada pada jiwa itu antara lain adalah keinginan, seperti lapar, dahaga, dan cinta. Ada pula unsur logis (akal), yaitu jalan yang mengantarkan manusia dapat belajar mengenai sesuatu. Di antara unsur keinginan dan unsur logis, dalam jiwa manusia, juga ada unsur semangat, yang menyangkut soal kehormatan. Unsur ini memberikan inspirasi kepada manusia untuk bertempur. Hal itu tidak didorong oleh ambisi atau keinginan, tapi didorong oleh rasa berontak terhadap ketidakadilan, dan rasa tunduk pada keadilan.⁷

Sebaliknya bagi Aristoteles, yang dapat dianggap sebagai bapak empirisme dalam bidang politik, klasifikasi negara harus dilakukan atas dasar pengumpulan fakta yang ada tentang negara itu. Dikabarkan bahwa ia telah mengumpulkan 158 konstitusi negara yang terdapat di zamannya, meskipun yang dapat dijumpai sampai sekarang ini tinggal hanya satu saja. Ia mengumpulkannya dan mengadakan tabulasi dari fakta yang dikumpulkannya itu sehingga sampai enam macam negara, yaitu berdasarkan baik atau buruk, dan berdasarkan jumlah penguasanya, yaitu seorang, sejumlah kecil orang dan banyak orang. Baik buruknya sebuah negara tergantung dari kepentingan siapa yang lebih diperhatikannya, yaitu apakah kepentingan rakyat banyak, atau kepentingan penguasa itu sendiri.⁸

⁷ Abdul Qadir Djae'ani, *Negara Ideal menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995), 9-10.

⁸ A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992), 142-144.

Dalam cita pemikiran politik kalangan Muslim di masa jaya mereka pada abad ke-10 sampai ke-15, terutama pemikir-pemikir yang hidup di Andalusia, pengaruh cita pikiran zaman Yunani Kuno itu tidak sedikit. Ahli-ahli seperti Ibnu Sina (Avicenna, 980-1037), Ibnu Rusyd (Averroes, 1126-1198) dan juga khususnya Al-Farabi sendiri (meninggal tahun 950), yang banyak membicarakan masalah-masalah manusia dan pergaulan hidupnya, termasuk politik, banyak memberikan komentar tentang pemikiran-pemikiran ahli-ahli Yunani Kuno itu, dan banyak pula mendapat pengaruh dari mereka.⁹

b Definisi Negara al-Farabi

Berbicara mengenai definisi Negara, kita mulai dengan mengemukakan pendapat al-Farabi. Dalam bukunya *Negara Utama*, ia mengatakan, "negara utama tidak ubahya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segal hidup bersama"¹⁰

Menurut al-Farabi, sifat keistimewaan manusia, antara lain adalah homo socius (suka bergaul). Ini merupakan salah satu dorongan terwujudnya suatu masyarakat. Manusia berkumpul satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka, di dalam satu masyarakat. Ini merupakan bibit timbulnya suatu Negara.

⁹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1997), 1.

¹⁰ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal: Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1995),8-9.

Manusia tak mungkin memperoleh seluruh keperluan hidupnya, kecuali dengan berkumpul antara yang satu dengan yang lainnya. Keperluan hidup manusia antara lain berupa makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Karena itu, pada tingkat pertama, manusia yang telah berkumpul itu memerlukan empat jenis manusia: petani, pembuat rumah, penenun kain, dan tukang sepatu.

Kemudian masyarakat itu semakin maju dan ramai. Kebutuhan hidupnya pun semakin bertambah. Mereka memerlukan tambahan empat macam manusia lagi: yaitu tukang kayu, tukang besi, pedagang besar, dan pedagang eceran.

Dengan lengkapnya jenis manusia seperti tersebut di atas, masyarakat mencapai tingkatnya yang sempurna, yaitu masyarakat kota. Setiap orang harus menyadari perlunya kerjasama yang teratur. Masing-masing harus berdiri di tempatnya masing-masing, bekerja dan menghasilkan sesuatu menurut kependaiannya. Dengan kesadaran, yang dihasilkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kawan-kawannya di dalam masyarakat. Mereka akan memperoleh imbuhan yang dibutuhkan.

Kerjasama antar anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengatur kerjasama yang baik, masyarakat memerlukan seorang pimpinan, yang diambil dan diangkat oleh anggota masyarakat tersebut. Pimpinan ini bertugas dan berwenang mengatur dan membagi segala hasil produksi, untuk memenuhi segala keperluan anggotanya. Masyarakat kota,

dengan seorang kepala negara atau pimpinan yang berwenang, itulah yang disebut negara.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh konsep Plato sedangkan Plato adalah salah seorang sarjana yang pertama-tama mengadakan pembahasan yang mendalam dan sistematis tentang bentuk-bentuk pemerintah. Plato membahas masalah-masalah itu dalam bab VIII dan IX dari karyanya sendiri (Republik). Klasifikasi Plato tentang bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut : bentuk pemerintahan yang terbaik ialah kerajaan dan bentuk merosot dari kerajaan ialah tirani.¹²

Tentang negara, al-Farabi menuangkannya dalam karyanya, *Ara' al-Madinah al-Fadhilah* (pendapat-pendapat tentang negara utama) adalah banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing memiliki fungsi tertentu.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Negara utama menyerupai badan yang sempurna dan sehat, dimana anggota badannya saling bekerja sama dengan sempurna. Kedudukan masing-masing anggota badan beraneka ragam, ada yang menduduki posisi penting (utama) dan ada juga yang cuma sebagai pelengkap. Satu anggota badan yang utama adalah hati, kemudian menyusul anggota yang lain yang berkedudukan dibawah hati, bagian tersebut berposisi sebagai pembantu hati. Hal ini berlanjut

¹¹ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal: Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1995), 2.

¹² F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), 185.

¹³ Hasyimasyah Nasution, *Filsafat Islam*, 41.

terus sampai bagian selanjutnya, di mana bagian yang lebih rendah menjadi pembantu bagi bagian yang di atasnya. Sampai bagian yang paling bawah, dimana tidak ada lagi yang dia pimpin, sehingga dia hanya berposisi sebagai pembantu. Hal ini layaknya tatanan sebuah negara, dimana bagian-bagiannya beraneka ragam dan memiliki spesifikasi masing-masing.

Seperti halnya anggota badan yang paling penting, dia adalah anggota yang paling sempurna diantara anggota yang lain, baik dari segi fisik maupun non fisik, sementara anggota yang lain berposisi sebagai pembantunya, sementara anggota yang duduk diposisi tertentu dibawahnya masih ada posisi lain yang lebih rendah, maka ia pun menjadi pemimpin bagi bagian di bawahnya, sekaligus pembantu di atasnya, proses ini berlangsung terus sampai anggota badan yang paling bawah.¹⁴

Pemimpin negara fadilah tidak mungkin dari sembarang orang walaupun sesuai dengan kesepakatan, karena pemimpin memiliki dua syarat, yakni, *pertama*, secara fitrah dia memang diposisi yang utama. *Kedua*, dia memiliki karakter dan kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan diperoleh karena fitrah dirinya memang menjadi pemimpin tidak akan diperoleh oleh orang lain, karena fitrah di luar dirinya adalah pembantu baginya. Posisi mayoritas adalah pelayan karena dari posisi pemimpin mesti ada pembantu dibawahnya begitu seterusnya posisi pembantu muncul dari atas sampai bawah, bahkan pada penghujung urutan yang tersisa adalah posisi pembantu. Oleh karena itu, dalam negara utama, atau

¹⁴ Al-Farabi, *Ara 'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Kairo, Muhammad Ali Subaih; tt.), 73-74

dalam suatu keahlian tertentu dinegara mana saja, pemimpin yang utama adalah pemimpin yang tertinggi (mempunyai otoritas tertinggi) dimana tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi darinya yang bisa memerintahnya, seperti layaknya bagian tubuh yang utama, dia tidak mungkin diperintah oleh bagian yang lebih rendah darinya. Begitu pula kalau kepemimpinan dalam kelompok di negara fadilah, maka pemimpin kelompok yang pertama hendaknya memiliki kemampuan yang tertinggi dan tidak di bawah yang lain, dan tidak diperintah oleh orang lain. Bahkan kependaiannya beserta tujuan kepemimpinannya diarahkan bagi semua komponen warga untuk kebaikan Negara fadilah.¹⁵

Menurut Javid Iqbal, dalam teorinya Negara Islam merupakan Negara Allah dan kaum Muslim merupakan partai-Nya (hizbullah). Hal ini berdasarkan konsep kebahagiaan (falah) : (1) harus berusaha untuk keberhasilan masyarakat Muslim di dunia ini serta mempersiapkannya untuk keberhasilan di akhirat; (2) untuk menyadari tujuan-tujuan tersebut, masyarakat Muslim (ummah) harus berdasarkan prinsip-prinsip persamaan hak, solidaritas, dan kemerdekaan.¹⁶

c. Tujuan Negara al-Farabi

Sejalan dengan Plato, Aristoteles dan Ibn Abi Rabi', al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat lantaran tidak mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan bantuan dan kerjasama dengan

¹⁵ Al-Farabi, *Ara 'Ahl al-Madinah al-Fadilah, ...* 79.

¹⁶ Mumtaz Ahmad (ed.), *State, Politik and Islam (Terjemah Masalah-masalah Teori Politik Islam)*, (Bandung: Mizan, 1996), 58.

orang lain. Adapun tujuan bermasyarakat adalah tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, melainkan juga untuk memenuhi kelengkapan hidup yang akan memberikan kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual, dan bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Berdasarkan konsep kebahagiaan, kepala negara utama menurut al-Farabi berperan sebagai guru (mu'allim), pembimbing, pengendali dan pembuat undang-undang dan peraturan. Hal ini karena manusia pada wataknya tidak dapat dengan sendirinya mengetahui kebahagiaan dan hal-hal lain yang pantas diketahui, sehingga ia perlu kepada guru pembimbing yang mampu berhubungan dengan akal aktif untuk menerima ma'rifah atau wahyu.

Kebahagiaan yang sebenarnya tidak mungkin dapat dicapai sekarang, melainkan sesudah kehidupan sekarang ini. Kehidupan yang tampak seperti kehormatan, kekayaan dan kesenangan adalah bukan dijadikan tujuan. Kebahagiaan sejati merujuk pada tindakan-tindakan etis, dan ini dapat terwujud hanya melalui kepemimpinan (pemerintahan Negara) yang ditegakkan dengan benar.¹⁷

Menurut Ibrahim Madkour berdasarkan pada konsep Plato, al-Farabi berpendapat bahwa negeri semua bagian dan tanggungannya terkait, seperti tubuh yang jika suatu anggotanya mengaduh maka anggota-anggota yang lain mengacuh merasa panas dan tidak bisa tidur. Maka penderitaan yang dirasakan

¹⁷ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 77.

oleh salah seorang anggota masyarakat harus diadukan kepada anggota-anggota yang lain, karena kesenangan individual tidak dibenarkan jika diketahui ada di dalam masyarakat yang baik. Seseorang tidak akan merasakan sakit sendirian di samping ia tidak akan merasakan senang sendirian, tetapi di dalam suatu masyarakat harus diedarkan satu jiwa yang merasakan kebutuhan orang banyak. Jika semua anggota tubuh mempunyai tugas khusus, maka setiap anggota masyarakat harus mempunyai kerja tertentu, sebab kebahagiaan masyarakat tidak akan tercapai kecuali jika pembagian kerja di antara individu-individunya dibagi secara memadai sesuai dengan kemampuan masing-masing dan diramu dengan semangat tanggung jawab dan saling tolong-menolong.

Sudah pasti bahwa kerja-kerja sosial itu bergraduasi sesuai dengan tingkat tujuan akhirnya, di mana yang paling tinggi dan mulia adalah hal-hal yang berhubungan dengan pimpinan masyarakat dan kepentingannya. Karena, terhadap negara, pimpinan bagaikan jantung terhadap tubuh, karena ia adalah sumber kehidupan serta pangkal keharmonisan dan undang-undang. Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan politik semata, tetapi juga berkaitan dengan moral. Karena ia adalah teladan yang menjadi ukuran dan kebahagiaan individu tersimpul di dalam menyamakan diri dengannya.¹⁸

¹⁸ Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam: Metode dan Penerapan, Bagian I*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993), 88-89.

d. Pengaruh Madzhab Syi'ah Ismailiyah

Dalam karyanya "Ara ahl Madinah al-Fadhilah", kepala Negara utama menurut al-Farabi berperan atau mempunyai tugas sebagai guru (*mu'allim*), pembimbing, pengendali, dan pembuat undang-undang dan peraturan. Hal ini karena manusia pada wataknya tidak dapat dengan sendirinya mengetahui kebahagiaan dan hal-hal lain yang pantas diketahui, sehingga ia perlu kepada guru pembimbing yang mampu berhubungan dengan Akal Aktif untuk menerima makrifah atau wahyu.

Menurut Hans Daiber justru melihat pengaruh konsep Ismailiyah terhadap konsep al-Farabi tentang universalitas perlambang-perlambang keagamaan dan tamsil-tamsil dibalik bentuk lahiriah kelas-kelas masyarakat dalam Negara utama al-Farabi.¹⁹

Di sini jelas kelihatan pengaruh Syi'ah, terutama Syi'ah Ismailiyah pada al-Farabi. Sistem sosialnya dibangun berdasarkan konsep perbandingan alam macro dengan alam micro, sehingga keperluan kepada adanya seorang guru atau imam merupakan sesuatu yang esensial bagi masyarakat. Konsepsinya tentang masyarakat sempurna berwatak macro-cosmos yang berada di bawah pimpinan seorang imam, seperti konsep politik Syi'ah.²⁰

¹⁹ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), 45-46.

²⁰ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 52.

e. Masyarakat dan Kepala Negara

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.²¹

Setiap manusia mempunyai fitrah dalam rangka menjalani kehidupannya dan mencapai kesempurnaannya untuk membutuhkan banyak hal yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Ia membutuhkan masyarakat yang masing-masing berposisi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin memperoleh kesempurnaannya tanpa adanya masyarakat yang saling bekerjasama, serta satu individu melakukan hal yang dibutuhkan individu yang lain dan begitu seterusnya sehingga membentuk suatu kerjasama. Saling ketergantungan ini terwadahi dalam komunitas yang disebut masyarakat, untuk mencapai tujuan kesempurnaan. Bial hal ini terwujud, masing-masing individu akan berkembang dalam kemakmuran yang diwadahi oleh komunitas yang disebut masyarakat. Bentuk masyarakat ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Masyarakat yang sempurna dibagi menjadi tiga yakni : besar, menengah dan kecil.

²¹ M.Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT.Aresco, 1992), 63.

- 1) Masyarakat Sempurna Besar, adalah masyarakat yang semuanya berada dalam kemakmuran.
- 2) Masyarakat Menengah, berarti masyarakat yang sempurna yang berkelompok dalam satu bagian didalam masyarakat yang makmur.
- 3) Masyarakat Kecil, berarti penduduk kota, berada disalah satu dari tempat tinggal masyarakat yang makmur.

Sedangkan masyarakat yang tak sempurna adalah masyarakat dari bagian yang terkecil, yakni kelompok serumah, sejalur, selokasi atau satu desa yang merupakan anggota satu negara yang tidak dalam kemakmuran. Yang lebih baik dan utama adalah bahwa kemakmuran dicapai oleh komunitas yang paling besar kemudian diteruskan oleh komunitas dibawahnya yang kesemuanya dicapai dengan usaha dan upaya yang keras.²²

Dari tiga macam masyarakat itu, pusat perhatian al-Farabi lebih terfokus pada masyarakat sempurna kecil yang disebut masyarakat kota. Menurut al-Farabi, Negara kota kesatuan politiknya menempati urutan yang terbaik daripada Negara bangsa (masyarakat sempurna besar) atau Negara regional (masyarakat sempurna sedang).²³

Dengan demikian, masyarakat yang sempurna dapat dikatakan masyarakat yang bernegara/ berpemerintahan, dimana dalam suatu negara terdapat masyarakat dan kepala negara sebagai pemimpin masyarakat. Negara

²² Al-Farabi, *Ara 'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, 72.

²³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik* 78.

tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dalam segala hal,

masyarakat yang demikian dikatakan masyarakat yang ideal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam rangka merealisasikan Negara utama, al-Farabi memfokuskan perhatiannya pada kepala Negara. Kedudukan kepala Negara sama dengan kedudukan jantung bagi badan yang merupakan sumber koordinasi. Oleh karena itu, pekerjaan kepala Negara tidak hanya yang bersifat politis, melainkan meliputi etika sebagai pengendali *way of life*.²⁴

Untuk menjadi kepala negara utama dia harus adil, bisa memimpin dengan baik, tak keras kepala (egois), mudah bila diajak ke jalan keadilan dan sulit bila diajak ke jalan kekejian dan kenistaan. Dia juga harus memiliki kemauan yang kuat untuk bertindak bagi tindakan yang seyogyanya dia lakukan dengan berani tanpa dilingkupi rasa takut serta tak lemah jiwanya. Syarat ini sulit dimiliki oleh satu orang, oleh karena itu, secara fitrah syarat itu dipenuhi satu persatu serta hal yang demikian merupakan sesuatu yang jarang ditemukan dalam masyarakat. Jika benar-benar ditemukan dalam negara utama seorang yang memenuhi syarat-syarat di atas keenam-enamnya atau lima saja tanpa ada yang menyerupai dengan menggunakan potensi "*mutakholyahnya*"²⁵ maka dia adalah pemimpin itu. Jika memang tidak ditemukan tipe pemimpin tersebut, maka ditetapkan pemimpin yang sesuai dengan rujukan syari'at dengan diadakannya seorang pemimpin kedua yang menggantikannya. Profil pemimpin kedua ini

²⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*..... 79.

²⁵ Mutakholyah adalah imajinasi. *Ensiklopedi Islam*,..... 332.

sudah diamati sejak lahir, masa kecilnya, secara bertahap dia memenuhi syarat-syarat di atas sehingga ketika dia dewasa keenam syarat di atas dipenuhinya. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Salah satu syarat yang utama adalah kebijaksanaan yang identik dengan seorang filosof, selanjutnya, dia harus 'alim, hapal syari'at dan hadis serta perilaku yang dicontohkan oleh ulama' terdahulu. Syarat tersebut dia harus memenuhi 12 karakter, salah satunya adalah dia harus memiliki kesempurnaan anggota badannya. Dan anggota badan tersebut siap bertindak apabila diperlukan dengan pemenuhan yang mudah dan cekatan. Dia memiliki pemahaman yang baik dan penggambaran sesuatu hal yang baik pula. Penggambaran tersebut terlontar sesuai dengan masalah yang harus dipecahkan. Serta dia harus memiliki daya ingat yang baik tentang apa yang dipahaminya, dilihatnya, didengarnya dan yang diketahuinya, semuanya itu harus dimiliki oleh kepala negara utama.²⁶

Dalam mengutarakan tingkatan-tingkatan akal, al-Farabi memperoleh bahan dari filsafat Yunani, yang kemudian dicobanya untuk dikompromikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan pandangan Islam. Menurut al-Farabi Akal Kesepuluh yang diberi nama Akal aktif (Aqal Fa'l) disamakan dengan malaikat dalam pandangan Islam.

Dalam diri seorang filosof dapat mengetahui hakikat karena dapat berhubungan dengan Akal Aktif tersebut. Demikian juga Nabi dan Rasul menerima wahyu Tuhan karena mempunyai kemampuan mengadakan komunikasi dengan Akal Aktif. Namun martabat Rasul dan Nabi lebih tinggi dari pada para filosof.

²⁶ Al-Farabi, *Ara 'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, 81.

Alasannya ialah karena para Rasul dan Nabi adalah pilihan dan komunikasinya dengan Akal Fa'al itu bukan atas usaha melainkan pemberian dari Tuhan. Adapun para filosof dapat berhubungan dengan Akal Fa'al itu adalah melalui usaha sendiri, yaitu dengan latihan dan kotemplasi yang selanjutnya filosof mengadakan komunikasi melalui Akal Mustafad (acquired intellect). Adapun para Nabi tidak perlu memperoleh Akal Mustafad itu, karena Nabi mengadakan kontak dengan Akal Fa'al (malaikat) bukan dengan akal, tetapi dengan adanya pengetahuan yang disebut Al-Mutakhayyilah atau imagination. Para Nabi diberi daya Imaginasi yang demikian kuatnya, sehingga tanpa latihan dan susah payah dapat berhubungan dengan Akal Fa'al. Dengan Al-Mutakhayyilah yang begitu kuat, Nabi dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh pancaindera atau tuntutan kebutuhan jasmani, sehingga ia dapat berkonsentrasikan hubungannya dengan Akal Fa'al itu. Daya imaginasi yang begitu kuat diberikan Tuhan hanya kepada Nabi dan Rasul. Atau dengan kata lain orang yang memperoleh daya imaginasi yang begitu kuatnya sehingga mampu berhubungan dengan Akal Fa'al itulah yang terpilih sebagai Nabi atau Rasul.

Menurut al-Farabi, pengetahuan filsafat tidak bertentangan dengan pengetahuan para Nabi, karena keduanya bersumber dari Akal Fa'al (malaikat). Namun pendapat al-Farabi masih perlu dikoreksi, karena tidak semua filosof itu tepat penemuannya, bahkan sering saling bertentangan. Sedangkan ajaran yang

dibawa Nabi mempunyai prinsip yang sama dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara ringkas, tentang negara utamanya al-Farabi adalah penguasa ini haruslah orang yang paling unggul baik dalam bidang intelektual maupun moralnya di antara yang ada. Di samping daya profetik yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia harus memiliki kualitas-kualitas berupa :

- (1) Kecerdasan,
- (2) Ingatan yang baik,
- (3) Pikiran yang tajam,
- (4) Cinta pada pengetahuan,
- (5) Sikap moderat dalam hal makanan, minuman, dan seks,
- (6) Cinta pada kejujuran,
- (7) Kemurahan hati,
- (8) Kesederhanaan,
- (9) Cinta pada keadilan,
- (10) Ketegaran dan keberanian,
- (11) Kesehatan jasmani,
- (12) Kefasihan berbicara.²⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁷ Hamzah Ya'qub, *Filsafat Agama: Titik Temu Akal dengan Wahyu*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 139-140.

²⁸ Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*,..... 41. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-press; 1993), 56. Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 51-52.

Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni negara itu terbagi dalam banyak kelas, al-Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna.²⁹

Pemimpin dalam konteks ini adalah seorang yang tidak ada lagi berposisi memimpinnya, dia adalah seorang imam, pemimpin pada peringkat *pertama* dalam negara utama. Hal ini merupakan ciri pertama. *Kedua*, dia adalah pemimpin rakyat yang utama dan pemimpin negara yang makmur. *Ketiga*, dia harus mempunyai kemampuan berpendapat yang terjaga dari kesalahan menurut syari'ah. *Keempat*, dia memiliki ide yang cemerlang dan argumentasi yang kuat untuk memprediksi berbagai masalah yang tidak dialami oleh para pendahulu (nenek moyang), kemudian dia mampu mengevaluasi kesimpulan-kesimpulannya dalam rangka kabaikan negara. *Kelima*, dia mempunyai kemampuan membimbing dengan rujukan pendapat ulama' salaf serta pendapat ulama-ulama berikutnya. *Keenam*, dia memiliki keberanian untuk ikut serta dalam peperangan, oleh karena itu ia harus memiliki strategi berperang.

Jika tidak ditemukan seorang pun yang memiliki keenam syarat diatas maka harus ada dua orang dalam memimpin negara. Salah satunya adalah seorang filsuf. Sementara yang lain harus memiliki sisa syarat utama yang harus dipenuhi. Dua orang itu adalah bagian yang utama dalam suatu negara. Apabila

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia; 1993), 55.

diperinci dalam satu kelompok maka filsuf sebagai satu bagian, orang kedua memiliki syarat pertama dan ketiga, atau syarat pertama dan keempat, atau syarat kelima atau syarat keenam. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang utama.

Apabila pada suatu waktu seorang filsuf tidak ditemukan sementara bagian yang lain yang disyaratkan ada, maka negara seolah tanpa raja atau pemimpin. Pemimpinnya akan memerintah untuk kesesatan, kekejian, karena dia cuma memberi separoh dari hak yang mesti diterima oleh warga. Pemimpin yang bersangkutan akan mendorong dan menghalalkan kedholiman dan kekejian terhadap semua hal yang dikiranya baik.³⁰

Jika tidak ada Nabi yang akan menjadi kepala negara, maka dapat digantikan oleh orang yang dianggap memiliki sifat nabi, yaitu filsuf. Rakyat harus bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kepentingan bersama. Inilah ciri yang harus ada pada negara ideal.³¹

Tambahan sufistik ini tampak adanya kecenderungan al-Farabi mengaitkan antara politik, dan pemerintahan dengan etika. Itulah sebabnya ia berpendapat Nabi dan Filosof adalah dua pribadi yang dapat memimpin Negara utama. Ungkapan ini bukan secara lahiriah mereka berdua benar-benar mejadi kepala Negara, melainkan nilai-nilai etik yang ada pada mereka itu menjiwai kepala Negara. Otomatis bila kepala Negara itu berjiwa nabi atau filosof akan

³⁰ Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, 82.

³¹ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, 41.

menjadi arif dan bijaksana, yang pada gilirannya akan mampu mendidik dan menarik rakyat kepada jalan yang benar, menuju kebahagiaan dunia-akhirat.³²
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. Hubungan Negara dan pemerintahan

Pemerintahan ada dua macam: *Pertama*, pemerintahan yang menegakkan tindakan-tindakan sadar, cara hidup, disposisi positif yang dengan cara demikian kebahagiaan dapat tercapai. Dalam hal ini terwujud dalam pemerintahan (Negara) utama, di mana kota-kota dan bangsanya tunduk pada pemerintah. *Kedua*, pemerintahan yang menegakkan sesuatu yang diasumsikan sebagai kebahagiaan, padanal bukan, inilah pemerintahan jahiliyyah. Pemerintahan kedua ini bentuknya beraneka ragam. Bila yang dikejar kehormatan disebut pemerintahan kehormatan (timokrasi), dan bila tujuan lain yang dikejar maka namanya sesuai dengan tujuannya.³³

Lebih lanjut, al-Farabi mengelompokkan negara (kota) menurut prinsip-
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 prinsip teleologis (tujuan) yang abstrak. Kota utama yang sering dijadikan bahan rujukan, pada hakekatnya hanyalah satu di mana kehidupan yang baik atau berbahagia dijadikan tujuan utama dan di mana keutamaan dapat berkembang dengan subur. Tetapi mungkin ada juga sebuah negara di mana tidak ada tujuan yang dijadikan pertimbangan kecuali pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam beberapa negara, raja, dan pembantu-pembantunya mungkin merasa puas dengan

³² Ibid, *Filsafat Politik* 80.

³³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, 77-78.

mencari kejayaan, dan kehormatan untuk diri mereka sendiri, baik lewat keutamaan (seperti pada negara aristokrasi dan timokrasi), kesehatan (seperti pada negara plutokrasi), asuhan yang baik (seperti pada monarki yang turun-temurun), maupun penaklukan (seperti pada negara tirani). Terakhir dalam beberapa negara (yaitu demokrasi) kesenangan mungkin dipandang sebagai tujuan akhir negara, sementara pada yang lain, dengan bentuk-bentuk pemerintahan campuran tujuan-tujuan kesehatan, kesenangan, dan kehormatan mungkin digabungkan.³⁴

Negara kota, yang selanjutnya kita sebut saja Negara, menurut al-Farabi terdapat bermacam-macam Negara yaitu : Negara utama, Negara bodoh, Negara rusak, Negara merosot, serta rumpun-rumpun jahat. Dalam menjelaskan Negara utama, al-Farabi mengilustrasikan fungsi dan peran suatu Negara bagaikan anggota-anggota badan, apabila salah satu menderita, anggota yang lain ikut merasakannya. Sama halnya tiap-tiap anggota badan mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, maka demikian pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial.³⁵

Sebagai kebalikan dari negara utama terdapat negara yang bodoh, negara yang rusak, negara yang merosot, dan negara yang sesat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

³⁴ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 42.

³⁵ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik*....., 78-79.

1. **Negara Bodoh** adalah negara yang rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka apa kebahagiaan itu. Kalau ditur-tun mereka tidak mau mengikuti dan kalau diberitahu tidak mau percaya. Negara yang bodoh itu bermacam-macam. Ada negara yang sangat primitif, yang perhatian rakyatnya hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan jodoh. Serta kerjasama untuk pengadaan keperluan tersebut. Ada negara yang lebih maju, tetapi perhatian rakyatnya terpusat pada kerjasama untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan materi dan penumpukan kekayaan. Ada Negara yang tujuan hidup rakyatnya adalah untuk menikmati makanan, minuman, seks dan berbagai hiburan lain. Ada negara yang tujuan hidup rakyatnya adalah untuk dihormati, dipuji dan tersohor dalam pergaulan antar bangsa. Ada negara yang perhatian rakyatnya terpusat pada nafsu untuk menaklukkan negara-negara lain, dan bangga dapat menguasai negara-negara tetangganya. Yang terakhir dari macam-macam negara yang bodoh itu adalah negara yang masing-masing dari rakyat menikmati kebebasan untuk berbuat sekehendaknya, yang akan berakibat timbulnya anarki.³⁶

2. **Negara Rusak** adalah negara yang rakyatnya tahu apa kebahagiaan itu, sama halnya dengan rakyat di negara utama, tetapi mereka berperilaku dan hidup seperti rakyat di negara yang bodoh. Dengan kata lain mereka tahu tentang hal-hal yang baik, tetapi yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang hina.

³⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-Press; 1993), 57.

3. **Negara Merosot** adalah negara yang rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan perilaku yang sama dengan pandangan hidup dan perilaku rakyat di negara utama, tetapi kemudian berubah dan terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji lagi. Korupsi dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan merajalela.

4. **Negara Sesat (*Mutabaddilah*)** adalah Negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan. Rakyatnya tidak percaya akan adanya Tuhan, sebaliknya kepala negara menipu rakyatnya dengan pengakuannya bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan, dan bahwa rakyat harus ikut apa yang dikatakan dan dilakukannya sebagaimana mereka harus mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang nabi.

5. **Rumput-Rumput Jahat** adalah orang-orang atau unsur-unsur yang rendah budi pekertinya, manusia berwatak liar dan tanpa budaya, yang dapat mengganggu keserasihan kehidupan masyarakat yang mungkin terdapat dalam tubuh di negara yang utama sekalipun.³⁷

Dengan demikian garis besar konsepsi al-Farabi tentang Negara yang asal-usulnya terdapat pada konsepsi Plato. Dalam hal ini, ia tampak sebagai filosof teoritis, jauh dari kenyataan realistik, memandang bahwa orang yang mampu berhubungan dengan Akal Aktif memiliki otoritas untuk menjadi Kepala

³⁷ Ibid, Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 58.

Negara, bahkan untuk mengajar dan membimbing warga negaranya ke jalan yang menjamin mereka kebahagiaan abadi.³⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian politik kenegaraan al-Farabi lebih menitik beratkan pada objek sesuai dengan idealismenya, dalam hal ini kepala negara yang meradi penuntun dalam suatu negara, bukan didasarkan pada sistem pemerintahan. Maka dari itu al-Farabi berpendapat bahwa Nabi/rasul dan filosof adalah dua pribadi yang paling tepat dalam memimpin suatu negara, karena secara otomatis bila kepala negara itu berjiwa Nabi/rasul atau filosof akan menjadi arif dan bijaksana, yang pada gilirannya akan mampu mendidik dan menarik rakyat ke jalan yang benar, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

g. Bentuk Negara dan pemerintahan

Pemimpin yang utama adalah pemimpin yang tertinggi (mempunyai otoritas tertinggi) dimana tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi darinya yang bisa memerintahnya, seperti layaknya bagian tubuh yang utama, dia tidak mungkin diperintah oleh bagian yang lebih rendah darinya. Begitu pula kalau kepemimpinan dalam kelompok di negara fadilah, maka pemimpin kelompok yang pertama hendaknya memiliki kemampuan yang tertinggi dan tidak di bawah yang lain, dan tidak diperintah oleh orang lain. Bahkan kepandaianya beserta tujuan kepemimpinannya diarahkan bagi semua komponen warga untuk kebaikan Negara fadilah.³⁹

³⁸ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 53.

³⁹ Al-Farabi, *Ara 'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, 79.

Sesuai dengan teorinya kota utama atau negara utama, al-Farabi lebih cenderung memasukkan kota utama dalam kota demokratis. Hal ini termuat dalam sebuah uraian yang lebih mendalam tentang kota seperti ini, al-Farabi menulis :

“Kota demokratis adalah kota yang setiap penduduknya mendapatkan keleluasaan dan dibiarkan melakukan apa pun yang dikehendakinya. Penduduknya setara dan hukum mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lain. Penduduknya leluasa melakukan apa pun yang dikehendakinya. Dan tak ada orang, apakah dia itu penduduk atau bukan penduduk, dapat mengklaim berwenang kecuali bila dia bekerja untuk memperbesar kemerdekaan mereka..... Mereka memerintah, berbuat demikian mengikuti kehendak mereka yang diperintah, dan penguasa mengikuti kehendak yang dikuasai.”

“Segegap upaya keras dan tujuan kota-kota jahiliah ada dalam kota seperti ini dengan cara yang sangat sempurna. Di antara semua (kota-kota jahiliah) itu, inilah kota yang paling terpuji dan bahagia. Secara lahiriah, ia seperti pakaian yang bersulam, yang penuh dengan celupan dan bentuk-bentuk warna-warni. Semua orang menyukainya, dan suka tinggal di dalamnya, karena semua kehendak atau keinginan manusia akan dipenuhi oleh kota ini. Berbagai bangsa bermigrasi ke kota ini untuk mukim, dan kota ini pun lalu tumbuh berkembang secara luar biasa. Orang dari segala ras memadati kota ini, dan melalui perkawinan melahirkan anak-anak yang kecenderungan mereka sangat beragam, dan dengan pendidikan serta proses pendewasaan sangat beragam pula.”⁴⁰

Dalam konteks inilah al-Farabi menyebutkan bahwa lama-kelamaan dapat bermunculan orang-orang bajik di kota seperti ini. Oleh sebab itu, menurut al-Farabi, “Kota seperti ini memiliki kebaikan maupun keburukan yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota jahiliah lainnya. Semakin besar, semakin berperadaban, semakin padat penduduknya semakin produktif, dan semakin sempurna kota ini, semakin besar pula kebaikan dan keburukan yang ada di kota ini.”⁴

⁴⁰ Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan ; 2002), 75.

⁴¹ Ibid, Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini*, 76.

C. KONSEP NEGARA KHOMEINI

a. Definisi Negara Khomeini

Mengenai definisi Negara, tidak ada perubahan-perubahan yang baru pada diri Khomeini, melainkan bentuk Negara yaitu Negara Islam atau Pemerintahan Islam.⁴² Ini terlihat ketika Khomeini ditanya tentang bentuk Negara Islam apa yang dicita-citakannya, ia menjawab, "Seperti 10 tahun pemerintahan Rasulullah saw. atau 5 tahun pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib." Bagi Khomeini, "Negara Islam" seperti Arab Saudi, Libia, dan lainnya bukanlah contoh dari sebuah Negara Islam yang berhasil dan patut ditiru.⁴³

Faqih,⁴⁴ dalam hal ini Khomeini, juga memiliki kekuasaan legislatif selain eksekutif. Kekuasaan legislatifnya bersumber dari kedudukannya sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki wewenang terbesar di bidang penafsiran terhadap sumber hukum. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat (popular

⁴² "Pemerintahan Islam adalah konstitusional bukan konstitusional dalam arti kata akhir-akhir ini, yaitu didasarkan atas disetujuinya hukum-hukum menurut mayoritas. Ia konstitusional dalam arti bahwa para penguasa tunduk pada seperangkat kondisi..... yang dikemukakan dalam Qur'an mulia dan Sunnah.....". John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 181.

⁴³ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 11.

⁴⁴ Faqih acalah seseorang yang menguasai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam serta seluruh aspek keimanan. Lihat *Sistem Pemerintahan Islam*, oleh Imam Khomeini, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 15.

Selama masa kekosongan Imam Mahdi inilah, maka kepemimpinan diserahkan kepada seorang pengganti yang dianggap menguasai bidang agama, hukum Islam, dan harus adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ini hanya dapat dilakukan oleh seorang *Faqih* terpilih. Ketaatan kaum Syi'ah terhadap tokoh tersebut dianggap sama dengan ketaatan terhadap Imam Keduabelas, oleh karenanya hukumnya wajib. Lihat *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, oleh Noor Arif Maulana, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 88.

acclamation). Ayatullah Khomeini, misalnya, muncul sebagai penguasa tertinggi karena dinilai berhasil memimpin revolusi Islam yang menggulingkan monarki Syah Iran dan membentuk sebuah Republik Islam. Sehingga Khomeini juga mendapat gelar sebagai "Pemimpin Revolusi Islam Iran" dan "Bapak Pendiri Republik Islam Iran".⁴⁵

Dengan demikian negara yang dipimpin oleh seorang faqih dimana ia disamping menjalankan hukum (syari'ah) juga sebagai kepala pemerintahan. Dan menerapkan hukum-hukum Tuhan yang didasarkan pada kesamaan dan keadilan, itulah yang disebut negara.

b. Tujuan Negara Khomeini

Menurut Javid Iqbal, secara tradisional, para faqih (ulama) menekankan tiga ciri penting sebuah negara Islam yaitu masyarakat Muslim (ummah), hukum Islam (syari'ah), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (khalifah).⁴⁶

Agar dapat survive dan membudaya terhadap masyarakat, sebuah ideologi haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : *Pertama*, dimensi realitas, yaitu kemampuan ideologi itu dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan yang telah ada dalam masyarakat. *Kedua*, dimensi idealisme, yaitu kemampuan ideologi tersebut untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang menganutnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi itu untuk

⁴⁵ Riza Sirbudi, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), 85.

⁴⁶ Mumtaz Ahmad (ed.), *State, Politics and Islam (Terjemah Masalah-masalah Teori Politik Islam)*, (Bandung: Mizan, 1996), 58.

dapat beradaptasi dan memiliki daya persuasif dengan pertumbuhan masyarakatnya.⁴⁷ Berdasarkan tiga macam ciri ideologi ini, pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan kontroversial Khomeini yang selalu menyudutkan pemerintahan Syah Iran dalam kasus Iran dapat disebabkan dan bertujuan pada tiga hal di bawah ini :

Pertama, Khomeini memiliki nilai atau keyakinan di dalam dirinya untuk membebaskan rakyat Iran dengan mengembalikan nilai “ke-fitrah-an” manusia untuk ke luar dari belenggu represivitas, kezaliman dan adanya imbalance pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Situasi dan kondisi yang terjadi di Iran sejak dikuasai oleh rezim Syah Iran dipandang Khomeini tidak mengalami perkembangan dan kemajuan secara substantif, namun hanya mengalami perkembangan kuantitas formal. Dampak negatifnya adalah terkekangnya rakyat Iran oleh aturan-aturan yang dibuat oleh rezim penguasa yang sangat otoriter. Nilai yang ada dalam diri Khomeini ini sangat berkaitan dengan fakta yang ada dihadapannya, sehingga menyebabkan dirinya terdorong untuk melakukan perlawanan dengan tujuan membebaskan rakyat Iran dari kemiskinan, kezaliman secara struktural oleh rezim Syah Iran.

Kedua, nilai-nilai ilahiah yang dianut oleh Khomeini mendorong dirinya untuk membebaskan dan menghantarkan rakyat Iran dari segala hal yang berhubungan dengan konflik maupun kekerasan. Khomeini ingin menggugah

⁴⁷ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 151.

semangat nurani rakyat dan menumbuhkan solidaritas antar mereka bahwa mereka semua itu saudara yang saat ini sedang mengalami nasib, kondisi, penderitaan dan kezaliman yang sama. Khomeini ingin menyadarkan mereka untuk bersama-sama melakukan tindakan pembebasan dan menentang praktik-praktik pelanggaran kemanusiaan melalui cara-cara damai, bermoral, dan beretika sesuai dengan tuntutan yang terdapat pada teologi Islami (mazhab Syi'ah) dan panduan-panduan para Imamiyah. Perlawanan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan Syah Iran ini hanya dapat berhasil dilakukan apabila semua komponen masyarakat bersatu padu memahami dan menerapkan nilai-nilai ideologi mazhab Syi'ah.

Ketiga, nilai-nilai ilahiah yang ingin diterapkan Khomeini adalah pembebasan manusia dari segala jenis tekanan maupun kungkungan pihak luar (makhluk), dan memungkinkan manusia untuk masuk menuju Tuhan atau spiritual, menuju kerajaan Allah SWT dengan seluruh mentalnya (jiwa-raga). Khomeini ingin menjadikan rakyat Iran memahami penderitaan dan penindasan yang selama ini dialami rakyat Iran. Semua ini merupakan sebuah cobaan yang datang dari Tuhan sehingga harus dihadapi dengan sabar dan lapang dada. Upaya penyelesaian atas kondisi tersebut adalah dengan mengedepankan nilai moral-spiritual dan mental 'ilahiah' dengan tindakan praktis.

Menurut Khomeini ada sepuluh tugas dan fungsi karakteristik pemerintahan Islam yang harus dapat dipenuhi, yaitu:

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam.

2. Melaksanakan hukum Islam.
3. Membangun tatanan yang adil.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menentang segala bentuk agresi dan mempertahankan kemerdekaan maupun integritas teritorial tanah Islam.
6. Memajukan pendidikan.
7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya.
8. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi.
9. Memecahkan masalah kemiskinan.
10. Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.

Dengan begitu, pemerintahan Islam dalam sebuah Negara Islam harus mampu menerapkan hukum-hukum Tuhan yang didasarkan pada kesamaan dan keadilan dengan mencegah kekejaman, kediktatoran, pengakuan akan eksistensi keadilan bagi individu dan sosial, pencegahan terhadap penjajahan, eksploitasi, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dan perbudakan, penerapan hukuman dan batas-batasnya, juga penerapan basis keadilan dalam rangka mengontrol sistem.⁴⁸

Dengan kata lain, Khomeini ingin menciptakan sebuah gerakan moral-spiritual maupun fisik untuk membebaskan harkat maupun martabat hidup manusia dari belenggu kemiskinan, ketertindasan, dan kekerasan baik dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, kultural maupun struktural. Manusia yang dimaksud adalah rakyat Iran yang mengalami nasib menyedihkan akibat tindak

⁴⁸ Ibid, Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran*, 103.

represif agen SAVAK Syah Iran. Khomeini yang mempunyai nilai-nilai Islami ideologi mazhab Syi'ah merasa bertanggungjawab secara moral-spiritual untuk melakukan upaya-upaya pembebasan, di mana sumber dari nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ilahiah.⁴⁹

Ideologi yang dianut oleh Ayatullah Khomeini sangat mempengaruhinya dalam mempersepsikan dan merealisasikan pikirannya. Dengan demikian, nilai ilahiah tersebut sangat mempengaruhi Khomeini dalam menempatkan konsep *wilayah al-faqih* di Iran, sebagai upaya perubahan menuju pemerintahan Islam.

Dengan demikian dalam pandangan Khomeini, Negara bertujuan sebagai usaha demi kepentingan dan kesejahteraan umum tanpa ada kepentingan individual yang berdasar pada perdamaian dan anti kekerasan yang bersumber pada nilai-nilai Islam.⁵⁰

c. Hubungan Negara dan Pemerintahan

Mungkin Khomeinilah yang merupakan orang pertama yang menguraikan secara garis besar teoritis dengan mencakup pernyataan tegas bahwa hanya suatu pemerintahan yang mempunyai ahli-ahli hukum agama (*Wilayah al-Faqih*) sajalah yang merupakan bentuk pemerintahan Islam yang dapat diterima. Dan bahwa seorang penguasa Islam perlu memerintah sejalan dengan hukum suci

⁴⁹ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 153.

⁵⁰ Ibid, 126.

(syari'at) dan hanya seorang ahli agama Islam yaitu ahli hukum agama (*Faqih*) sajarah yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang syari'at. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam agama Islam menjadi hak perwalian para faqih (*Wilayah al-Faqih*).

Setelah diterimanya Konstitusi Iran melalui referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979, Iran melangkah ke arah normalisasi kehidupan politik. Konstitusi yang terdiri dari 175 artikel ini dibuat berdasarkan hukum Islam, yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di dalamnya : *Faqih*, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi.

Kekuasaan terbesar dipegang oleh *faqih* (saat ini dijabat oleh Imam Ali Khamenei), yang dipilih oleh Dewan Ahli dengan syarat-syarat tertentu. Seandainya tidak ada yang memenuhi syarat, maka wewenang faqih akan dipegang oleh sebuah dewan yang beranggotakan 3 sampai 5 orang fukaha.

Wewenang *faqih* antara lain :

1. Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran.
2. Mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pengawal Revolusi (Pasdaran).
4. Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi.

5. Membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang angota-anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, KSAB, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasihat yang diangkat oleh faqih.

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah presiden yang dipilih setiap empat tahun. Tugas-tugas pokoknya antara lain menjalankan konstitusi negara, menjadi kepala pemerintahan, serta mengkoordinasikan ketiga lembaga negara : eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵¹ Presiden merupakan pejabat tertinggi Pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional. Ia menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat Perdana Menteri setelah parlemen memberikan persetujuannya. Presiden dapat meminta kabinet untuk bersidang kapan saja, langsung di bawah pimpinannya.

Majlis-e-Shura-e-Islami. Majlis yang berfungsi sebagai parlemen, terdiri dari 270 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun.⁵²

Di samping parlemen, terdapat sebuah badan yang disebut Dewan Pelindung Konstitusi (*Syura-ne-Gahdan*) yang beranggotakan 12 orang. Enam

⁵¹ Menurut Montesquieu (1689-1755), kekuasaan legislatif yaitu pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu yang mengadili (badan peradilan), Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 61. Dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi Negara Republik Islam Iran berada di tangan Presiden –yang masih berada di bawah garis kekuasaan Imam atau wilayah al-faqih, kemudian Perdana Menteri, kekuasaan legislatif ditangani oleh tiga lembaga, yakni: Majelis-e-Syura-e-Islami (Majelis Konsultasi Islami, selanjutnya disebut Majelis atau Parlemen), Shuraye-Nigahban (Dewan Perwalian Undang-Undang Dasar atau The Council of Guardian of The Constitution), dan Majelis-e Khubreqan (Majelis Ahli), kekuasaan yudikatif dikuasai oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran. Lihat Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 171-174.

⁵² Riza Sihbudi, *Profil Negar-Negara Timur Tengah*, (Jaka-ta: PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), 87.

orang anggotanya adalah ahli hukum Islam (*fukaha*) yang diangkat oleh *faqih*, sedangkan 6 orang lainnya terdiri dari ahli hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui oleh parlemen. Tanpa persetujuan Dewan Pelindung Konstitusi, seluruh kegiatan parlemen tidaklah sah. Tugas utama dewan ini adalah melindungi Islam dan Konstitusi Negara Islam Iran. Dewan ini memiliki kekuasaan untuk menafsirkan Konstitusi Iran dan bertugas melaksanakan referendum, pemilihan presiden, dan pemilihan anggota parlemen.⁵³

d. Kepala Negara

Dengan demikian seorang *faqih* memiliki otoritas tinggi dalam menjalankan pemerintahan Islam. Tetapi, tidak semua *faqih* mempunyai kualifikasi untuk menjadi pemimpin, sehingga *faqih* tersebut dapat menjalankan roda pemerintahannya. Ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang *faqih* agar dapat memimpin sebuah pemerintahan Islam yaitu;

- (1) Mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam;
- (2) Harus Adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi;
- (3) Dapat dipercaya dan berbudi luhur;
- (4) Jenius;
- (5) Memiliki kemampuan administrative;
- (6) Bebas dari segala pengaruh asing;

⁵³ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Puataka Zahra; 2002), 11-12.

(7) Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(8) Hidup sederhana.

Dalam menerapkan suatu pemerintahan Islam sesungguhnya memang diperlukan orang-orang yang mempunyai kualifikasi di atas dan mampu memahami hukum-hukum Tuhan dengan baik. Dan kondisi itu hanya dimiliki oleh seorang *faqih*.⁵⁴

Dalam pemerintahan Islam menurut Khomeini, umat Islam harus mempunyai petunjuk atau pelindung, oleh karenanya diperlukan seorang imam dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam (*faqih*). Dalam konsep pemerintahan, para ulama menduduki posisi sebagai pengarah, penafsir, dan pelaksana hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan yang demikian merupakan pemerintahan Islam yang sebenar-benarnya dan adil.

Menurut Khomeini, pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama yang paling utama, yang mengalahkan ajaran sekunder, termasuk salat, puasa, dan haji. Penguasa dapat menutup masjid atau sekalian meruntuhkannya jika dinilai menjadi sumber bahaya. Pemerintah memiliki hak dan kekuasaan untuk secara sepihak mengabaikan ketentuan syari'at apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan atau maslahat negeri dan Islam.⁵⁵

⁵⁴ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 101.

⁵⁵ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dincmika Masa Kini* (et al.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Jil.6, 64.

e. Pengaruh Madzhab Syi'ah Istna Asyariyah

Pandangan atau pikiran Khomeini secara garis besar dapat diketahui dalam tiga dasar yang menjadi ideologi kaum Syi'ah, yaitu; *pertama*, kepemimpinan (imamah) – salah satu dari rukun iman dalam pandangan Syi'ah, disamping Keimanan terhadap Allah SWT yang Esa (Tauhid), Kenabian (Nubuwah), Keadilan ('Adalah), dan Keyakinan terhadap hari Akhir (Al-Wa'ad) –adalah merupakan bagian terpenting dalam keislaman, karena perbandingan ayat yang berkaitan dengan ibadah dengan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan adalah satu berbanding dengan seratus ayat. Dan dengan sendirinya Kepemimpinan menjadi bagian terpenting dalam upaya kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada sumber hukum Islam; al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, Kesyahidan (pengorbanan), adalah dasar dalam upaya kematian di jalan Allah SWT (fi sabilillah) sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Husein, cucu Rasulullah Saw. yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dalam peristiwa Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 H, beserta 72 pengikutnya.

Ketiga, pembelaan terhadap kaum tertindas atau lemah (Mustadl'afin) dari penindasan kaum yang tiranik (Mustakbirin) untuk mewujudkan suatu Negara atau pemerintahan yang berkadilannya bagi seluruh manusia, khususnya umat Islam.⁵⁶

⁵⁶ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2003), 124-125.

f. Bentuk Negara dan pemerintahan

Iran tampak sekali mewakili bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap Negara di dalam Islam sebagai ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tak semata-mata bersifat duniawi (materialistik). Meskipun demikian, dalam praktiknya hal itu tampaknya tidak hendak dicapai lewat suatu yang dalam kosa kata politik disebut sebagai teokrasi, melainkan lewat suatu mekanisme semacam nomo-demokrasi (gabungan antara sistem berdasarkan nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum demokrasi). Atau, kalau mau sebut saja “teodemokrasi”. Ini merupakan sistem politik yang menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syari’ah dengan demokrasi yang mengandalkan partisipasi masyarakat atau orang banyak. Seperti namanya, sistem politik ini merupakan hasil proses dialog antara sistem nomokrasi atau “teokrasi” dengan demokrasi.⁵⁷

Demikianlah model kekuasaan wilayah al-faqih ini boleh dipandang sebagai terobosan yang bisa mencairkan kebekuan persepsi, bahwa dalam sistem politik itu seolah tidak ada pilihan ketiga, kecuali monarki, teokrasi dan demokrasi. Melihat partisipasi rakyat dalam proses politik sangat besar, tidaklah menunjukkan bahwa Iran pada masa ini menggunakan sistem politik demokrasi, dalam arti bahwa kedaulatan tinggi berada di tangan rakyat (tahta otoritas). Walaupun partisipasi rakyat mendapat porsi yang begitu besar, tetapi mereka dibatasi oleh hukum-hukum syari’at Islam, yang merupakan pedoman tertinggi

⁵⁷ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*....., 130.

dan harus ditaati oleh semua umat Islam. Sistem politik Syi'ah ini, tidak dapat di kategorikan sebagai sistim demokrasi. Sebab, dalam kenyataannya rakyat tidak bebas berkehendak, tetapi dibatasi oleh syari'at Islam. Demikian pula sistim politik yang berjalan di Iran pada saat ini, tidak dapat dikatakan sebagai sistim teokrasi. Sebab, dalam prakteknya rakyat diikutsertakan dalam perpolitikan. Oleh karena itu, sesungguhnya sistim politik yang ada di Iran sekarang itu merupakan gabungan antara sistim teokrasi dan sistim demokrasi, yang disebut dengan sistim teodemokrasi.

Segara setelah tergulingnya kekuasaan Syah Iran yang otoriter dan represif, Khomeini bersama kaum mullah melaksanakan suatu referendum untuk menentukan sistem politik dan bentuk Negara Iran yang sesuai dengan aspirasi dan kondisi rakyat Iran. Bentuk Negara berubah dari monarki-absolut menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran Islam mazhab Syi'ah melalui sebuah referendum yang disetujui oleh mayoritas (98,2%) rakyat Iran yang diadakan pada tanggal 1 April 1979.⁵⁸ Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran disetujui mayoritas (99,5%), rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979.⁵⁹

Pertama sekali, penting untuk diingat bahwa para Bapak Revolusi Islam di Iran dengan penuh kesadaran memilih bentuk republik. Di satu segi, hal ini jelas merupakan bukti bahwa mereka tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan

⁵⁸ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran*....., 171.

⁵⁹ Riza Sihbudi dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), 84.

sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh Revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke Abad Pertengahan. Republik dipilih tentu karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam mengenai masalah ini. Meskipun demikian, ada sesuatu hal penting yang perlu diperhatikan.

Konsep republik, sebagaimana diterangkan dalam RII, telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan wilayah al-faqih, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika.⁶⁰ Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam – apakah itu namanya wilayah atau imamah – tidak cukup terwakili didalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang didalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam.⁶¹

⁶⁰ Kekuasaan Negara dilakukan oleh tiga badan yang disebut trias politika meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Muhammad Azhar, *Filsafat Politik :Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 138.

⁶¹ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan; 2002), 127.

Faqih,⁶² dalam hal ini Khomeini, juga memiliki kekuasaan legislatif selain eksekutif. Kekuasaan legislatifnya bersumber dari kedudukannya sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki wewenang terbesar di bidang penafsiran terhadap sumber hukum. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat (popular acclamation). Ayatullah Khomeini, misalnya, muncul sebagai penguasa tertinggi karena dinilai berhasil memimpin revolusi Islam yang menggulingkan monarki Syah Iran dan membentuk sebuah Republik Islam. Sehingga Khomeini juga mendapat gelar sebagai "Pemimpin Revolusi Islam Iran" dan "Bapak Pendiri Republik Islam Iran".⁶³ Selanjutnya, kekuasaan Khomeini semakin lama semakin besar. Pada akhir 1987 dan 1988. Khomeini melalui fatwanya menyetujui amandemen konstitusi yang membolehkan negara mengabaikan ketentuan syari'at jika hal itu selaras dengan kelangsungan hidup negara dan kepentingan masyarakat (masalah) sebagaimana ditafsirkan pemerintah atau Khomeini sendiri. Latar belakang peristiwa ini adalah kebuntuan konstitusional yang disebabkan oleh pertarungan kekuasaan antara parlemen dan pemerintah.⁶⁴

⁶² Faqih adalah seseorang yang menguasai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam serta seluruh aspek keimanan. Lihat *Sistem Pemerintahan Islam*, oleh Imam Khomeini, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 15.

Selama masa kekosongan Imam Mahdi inilah, maka kepemimpinan diserahkan kepada seorang pengganti yang dianggap menguasai bidang agama, hukum Islam, dan harus adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ini hanya dapat dilakukan oleh seorang *Faqih* terpilih. Ketaatan kaum Syi'ah terhadap tokoh tersebut dianggap sama dengan ketaatan terhadap Imam Keduabelas, oleh karenanya hukumnya wajib. Lihat *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, oleh Noor Arif Maulana, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 88.

⁶³ Riza Sihbudi, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), 85.

⁶⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini* (et al.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Jil.6, 64.

BAB IV

ANALISA DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Analisa data merupakan penjelasan data-data yang diperoleh lewat penelitian, baik data berupa fakta atau bukti fisik maupun data yang berupa persepsi masyarakat, persepsi kelompok lain atau pihak lain, persepsi tokoh dan lain-lain.¹

Dalam sebuah penelitian komparatif, hal umum yang biasa dilakukan oleh kebanyakan peneliti adalah meneliti tentang persamaan dan perbedaan suatu konsep yang dikaji. Begitu juga dalam studi komparatif ini, penulis mencoba menganalisa tentang persamaan dan perbedaan yang terjadi antara konsep Negara al-Farabi dengan konsep Negara Khomeini serta menganalisa latar belakang terjadinya persamaan pemikiran antara keduanya.

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Negara Al-Farabi dengan Khomeini

Persamaan-persamaan konsep Negara al-Farabi dan Khomeini didasari adanya persamaan latar belakang. Persamaan tersebut adalah, al-Farabi dan Khomeini sama-sama hidup dalam kekacauan pemerintahan. Al-Farabi dilahirkan pada zaman kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak pertentangan dan pemberontakan. Sedangkan Khomeini hidup pada pemerintahan rezim Syah Iran terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan Syah Iran. Hal ini

¹ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2004), 16.

dibuktikan dengan adanya persamaan-persamaan dalam konsep al-Farabi dengan Khomeini.

- 1) Dalam hal kepemimpinan atau kepala pemerintahan negara (kota), adalah mereka sama-sama memberikan persyaratan atau syarat-syarat khusus yang harus ada dalam diri seorang penguasa atau pemimpin Negara (kota), supaya terwujud suatu Negara aman rakyat atau masyarakat yang juga disebut Negara ideal.
- 2) Persamaan kedua, tentang tujuan Negara, kota utamanya al-Farabi yang sering dijadikan bahan rujukan, pada hakekatnya hanyalah satu di mana kehidupan yang baik atau berbahagia dijadikan tujuan utama dan di mana keutamaan dapat berkembang dengan subur. Demikian Khomeini, agar masyarakatnya bahagia dan didasarkan pada kesamaan dan keadilan dengan mencegah kekejaman, kediktatoran, pengakuan dan eksistensi keadilan bagi individu dan sosial, pencegahan terhadap penjajahan, eksploitasi, dan perbudakan, penerapan hukuman dan batas-batasnya.
- 3) Persamaan ketiga, tentang mazhab Syi'ah al-Farabi dalam konsep Negara utama tentang syarat-syarat kepala Negara, di sini sudah jelas kelihatan pengaruh Syi'ah, terutama Syi'ah Ismailiyah pada diri al-Farabi. Demikian Khomeini juga jelas kelihatan pengaruh Syi'ah tentang kepemimpinan atau imamah, terutama Syi'ah Imam Keduabelas (Syi'ah Itsna As'ariyah).

Di samping persamaan perlu dituliskan juga perbedaan konsep al-Farabi dengan Khomeini mengenai Negara yaitu :

- 1) Bentuk Negara, tampaknya bentuk Negara utama atau kota utama sama halnya dengan bentuk Kerajaan, mana kala dilihat dari karyanya sendiri *'Ara Ahl Madinah al-Fadhilah* yang mengatakan seperti layaknya bagian tubuh yang utama, dia tidak mungkin diperintah oleh bagian yang lebih rendah darinya. Juga di pengaruhi oleh keadaan alam sekitar kelahiran al-Farabi dan juga di pengaruhi oleh pemikiran Plato. Lain halnya dengan bentuk Negara yang diperintah Khomeini, yaitu Republik yang berdasarkan pada ajaran Islam mazhab Syi'ah melalui sebuah referendum yang disetujui oleh mayoritas (98,2%) rakyat-nya, yang diadakan pada tanggal 1 April 1979.
- 2) Bentuk pemerintahan, Sesuai dengan teorinya kota utama atau Negara utama, al-Farabi lebih cenderung memasukkan kota utama dalam pemerintahan demokratis, lain halnya pemerintahan Khomeini yaitu "teodemokrasi". Ini merupakan sistem politik yang menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syari'ah dengan demokrasi yang mengandalkan partisipasi masyarakat atau orang banyak
- 3) Dalam hal kepala, Negara al-Farabi maupun Khomeini berpendapat bahwa orang yang pas untuk mengepalai suatu Negara adalah nabi, tetapi yang membedakan konsep keduanya adalah, jika al-Farabi berpendapat bahwa kalau nabi sudah tidak ada yang menggantikannya adalah seorang

filosof sedangkan Khomeini yang menggantikan nabi dalam pemerintahan adalah Imam atau seorang faqih.

- 4) Perbedaan keempat, yaitu al-Farabi tidak pernah menduduki salah satu jabatan pemerintahan sedangkan Khomeini pernah menduduki jabatan pemerintahan sebagai seorang faqih, hal itu di satu pihak merupakan keuntungan, tetapi di lain pihak merupakan kerugian.

Merupakan keuntungan oleh karena al-Farabi dan Khomeini mempunyai kebebasan dalam berfikir tanpa harus berusaha menyesuaikan gagasannya dengan pola politik yang ada. Juga keuntungan Khomeini mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan, dan juga untuk menguji kebenaran teorinya dengan kenyataan-kenyataan politik yang terjadi di tengah kehidupan bernegara pada zamannya. Merupakan kerugian oleh karena al-Farabi tidak mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan, dan juga untuk menguji kebenaran teorinya dengan kenyataan-kenyataan politik yang terjadi di tengah kehidupan bernegara pada zamannya.

B. Analisa

Setiap Pemimpin negara fadilah al-Farabi dan negara Islam Khomeini tidak mungkin dari sembarang orang walaupun sesuai dengan kesepakatan, karena pemimpin memiliki dua syarat, yakni, *pertama*, secara fitrah dia memang diposisi yang utama. *Kedua*, dia memiliki karakter dan kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan diperoleh karena fitrah dirinya memang menjadi pemimpin tidak

akan diperoleh oleh orang lain, karena fitrah di luar dirinya adalah pembantu baginya. Posisi mayoritas adalah pelayan karena dari posisi pemimpin mesti ada pembantu dibawahnya begitu seterusnya

Jadi konsep Negara al-Farabi itu muncul karena dia berasal dari kekacauan pemerintahan, pada masa dia tumbuh dewasa. Tetapi kekacauan pemerintahan pada masa al-Farabi adalah perebutan wilayah dan kekayaan nenek moyangnya dan semua golongan merasa lebih berhak untuk memimpin dunia Islam. Mungkin karena situasi politik yang demikian, maka al-Farabi merasa terpanggil untuk mencari pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal.

Kita kembali pada Khomeini yang juga terjadi kekacauan sistem pemerintahan yang diterapkan di negaranya. Tetapi kekacauan pemerintahan pada masa Khomeini adalah sistem pemerintahan rezim Syah Iran membuat rakyatnya sengsara oleh peraturan-peraturan otoriter yang membuat terkekangnya rakyat Iran. Oleh karena situasi politik yang berkembang saat itu, maka Khomeini merasa terdorong untuk melakukan perlawanan dengan tujuan membebaskan rakyat Iran dari kemiskinan, kezaliman secara struktural oleh rezim Syah Iran.

Jadi latar belakang terjadinya perbedaan konsep Negara al-Farabi dengan Khomeini hanyalah terdapat pada di buktikan maupun tidak dibuktikannya konsep mereka pada pemerintahan pada zamannya. Al-Farabi hanyalah untuk mencari pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal. Sedangkan bagi Khomeini, seperti halnya al-Farabi dan juga beliau menerapkannya pada pemerintahan yang ada di zamannya. Dan latar belakang terjadinya persamaan

konsep Negara al-Farabi dan Khomeini, keduanya dilatar belakangi oleh kekacauan sistem pemerintahan dan pola kehidupan bernegara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikian analisa yang dapat penulis uraikan, yang pada intinya konsep Negara keduanya adalah keselarasan dalam pemerintahan. Dan mengupayakan kebahagiaan serta kemakmuran rakyatnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian pada bab-bab yang terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Negara menurut al-Farabi adalah Manusia berkumpul satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka, di dalam satu masyarakat. Ini merupakan bibit timbulnya suatu Negara.

Manusia tak mungkin memperoleh seluruh keperluan hidupnya, kecuali dengan berkumpul antara yang satu dengan yang lainnya. Keperluan hidup manusia antara lain berupa makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Karena itu, pada tingkat pertama, manusia yang telah berkumpul itu memerlukan empat jenis manusia: petani, pembuat rumah, penenun kain, dan tukang sepatu.

Kemudian masyarakat itu semakin maju dan ramai. Kebutuhan hidupnya pun semakin bertambah. Mereka memerlukan tambahan empat macam manusia lagi: yaitu tukang kayu, tukang besi, pedagang besar, dan pedagang eceran.

Dengan lengkapnya jenis manusia seperti tersebut di atas, masyarakat mencapai tingkatnya yang sempurna, yaitu masyarakat kota. Setiap orang harus menyadari perlunya kerjasama yang teratur. Masing-masing harus berdiri di tempatnya masing-masing, bekerja dan menghasilkan sesuatu

menurut kepandaianya. Dengan kesadaran, yang dihasilkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kawan-kawannya di dalam masyarakat. Mereka akan memperoleh imbalan yang dibutuhkan kerja sama antar anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengatur kerja sama yang baik, masyarakat memerlukan seorang pimpinan, yang diambil dan diangkat oleh anggota masyarakat tersebut. Pimpinan ini bertugas dan berwenang mengatur dan membagi segala hasil produksi, untuk memenuhi segala keperluan anggotanya. Masyarakat kota, dengan seorang kepala negara atau pimpinan yang berwenang, itulah yang disebut negara.

Kota utama yang sering dijadikan bahan rujukan, pada hakekatnya hanyalah satu di mana kehidupan yang baik atau berbahagia dijadikan tujuan utama dan di mana keutamaan dapat berkembang dengan subur.

Jika tidak ada Nabi yang akan menjadi kepala negara, maka dapat digantikan oleh orang yang dianggap memiliki sifat nabi, yaitu filosof. Rakyat harus bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kepentingan bersama. Inilah ciri yang harus ada pada negara.

2. Negara menurut Khomeini adalah Negara yang dipimpin oleh seorang faqih dimana ia disamping menjalankan hukum (syari'ah) juga sebagai kepala pemerintahan. Dan menerapkan hukum-hukum Tuhan yang didasarkan pada kesamaan dan keadilan dengan mencegah kekejaman, kediktatoran, pengakuan akan eksistensi keadilan bagi individu dan sosial, pencegahan

terhadap penjajahan, eksploitasi, dan perbudakan, penerapan hukuman dan batas-batasnya, juga penerapan basis keadilan dalam rangka mengontrol sistem kenegaraan, sebab kebahagiaan masyarakat tidak akan tercapai, jika dilaksanakannya hukum (syari'ah) tersebut.

3. Terjadinya persamaan dalam konsep Negara al-Farabi dan Khomeini disebabkan karena keduanya sama-sama lahir dan tumbuh dewasa dalam keadaan pemerintahan yang kacau. Maka berangkat dari sinilah keduanya mempunyai pemikiran politik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu Negara yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat serta dapat menjamin keamanan hidup rakyatnya. Perbedaan konsep Negara al-Farabi dengan Khomeini terletak pada bentuk pemerintahan dan bentuk Negara. Bentuk Negara al-Farabi di lihat dalam karyanya Ara Ahl Madinah al-Fadhilah yaitu tentang Negara utama merujuk ke bentuk kerajaan yang mana seorang pemimpin yang utama adalah tidak ada pemimpin lagi setelah dia dan tidak ada yang memerintah kepadanya. Selain itu konsep bentuk Negara kerajaan dilator belakang oleh semasa hidupnya pada masa kekuasaan bani Abbasiyah, dan menjadikannya muncul pemikiran politiknya. Sedangkan bentuk Negara Khomeini adalah berbentuk Republik.

Bentuk pemerintahan di dalam konsep al-Farabi adalah berasal dari rakyat yaitu sebuah pemerintahan demokrasi. Sedangkan bentuk pemerintahan Khomeini adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum (syari'ah) Tuhan atau teokrasi dan juga pemerintahan berasal dari rakyat atau

demokrasi, yang oleh Khomeini diterapkan secara bersamaan yang

melahirkan bentuk pemerintahan baru yang disebut teodemokrasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran – Saran

Setelah penulis menelaah dan memahami isi permasalahan politik dan Negara, tidaklah berlebihan jika penulis dapat menyarankan bahwa :

1. Kita sebagai rakyat, seharusnya dapat menjalankan tugas kita sebagai rakyat.

Janganlah kita menuntut hak kita sebelum kita melaksanakan kewajiban kita.

2. Dalam menjalankan roda pemerintahan, para pemimpin juga haruslah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Para politikus hendaknya dapat mengontrol roda pemerintahan dengan benar agar tidak merugikan orang lain, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dengan demikian tidak akan terjadi seperti yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, akibat ulah para pemimpin dan para politikusnya, yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Para pejabat hendaklah jangan menjadikan jabatannya sebagai kedok untuk kepentingan dirinya dan para kroninya sendiri. Sehingga kemakmuran dan kebahagiaan serta keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, dan bukan hanya kalangan atas saja.

C. Penutup

Demikianlah uraian kami dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas yang dibebankan kepada setiap mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang merupakan salah satu syarat untuk melengkapi ujian teoritis guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu Ushuluddin.

Kami yakin bahwa apa yang kami kemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena kedangkalan dan keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu, jika terdapat kekeliruan dan kesalahan terutama di dalam usaha kami mengetahui lebih jelas konsep Negara menurut al-Farabi dan Khomeini, tidaklah lupa kami mengharapkan kepada pembaca agar sudi meluruskan serta membetulkan kesalahan-kesalahan kami.

Selanjutnya kami berharap dan berdo'a semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat pada diri kami dan juga para pembaca, amin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abdullah, Taufik (ed.). Jilid 6. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Dinamika Masa Kini)*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ahmad, Mumtaz. (ed.). 1996. *State, Politik and Islam (Terjemah Masalah-masalah Teori Politik Islam)*, Bandung: Mizan.

Al-Farabi. tt. *Ara 'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, Kairo: Muhammad Ali Subaih.

Arif Maulana, Noor. 2003. *Revolusi Islam Iran dan Vilayat-I Faqih*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik (Perbandingan antara Islam dan Barat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bakar, Osman. 1997. *Hierarki Ilmu : Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi*, Bandung: Mizan

Daudy, Ahmad. 1986. *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Dewan Redaksi. Cet.4. 1997. *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Esposito, John L. (ed.). 1987. *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Pers.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Harichayono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara

Wacana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi: Pengertian dan Problem-Problemnya*, Jakarta:

Erlangga.

Isjwara, F. 1997. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta.

Kencana Syafi'ie, Inu. 1997. *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Khomeini, Imam. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra.

Madkour, Ibrahim. 1993. *Filsafat Islam: Metode dan Penerapan, Bagian I*, Jakarta:

PT.Raja Grafindo Persada.

Majid, Nurcholish. 1984. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

May Rudy, Teuku. 1993. *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaan*, Bandung: Eresco.

Mustofa, H.A. 1997. *Filsafat Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia.

Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Universitas Indonesia (UI)-Press.

Nasution. Hasyimsyah. 1999. *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Noer, Deliar. 1997. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Bandung: Mizan.

Poerwadarminta, W.J.S. 1978. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka.

Pulungan, Suyut. J. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta:

Rajawali Press.

Rahmena, Ali. (ed.). 1996. *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan.

Sabon (Tim Penyusun), Max Boli. 1994. *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*,

Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sihbudi ckk., Riza. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Jakarta: PT.Dunia
Pustaka Jaya.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*,
Jakarta: Universitas Indonesia (UI)-Press.

Soelaeman, M. Munandar. 1992. *Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*,
Bandung: PT.Aresco.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syadali, Ahmad., Mudzakir. 1997. *Filsafat Umum*, Bandung: CV.Pustaka Setia.

Syari'ati, Ali. 1995. *Ummah Dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung:
Pustaka Hidayah.

Tim Penyusun. 2004. *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Ampel.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ya'qub, Hamzah. 1991. *Filsafat Agama: Titik Temu Akal dengan Wahyu*, Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya.

Zainuddin, A.Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara (Pemikiran Politik Ibnu
Khaldun)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.